

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu tantangan dinas yang paling signifikan yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kurangnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekuensi kesehatan dan pada lingkungan yang berkelanjutan. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana pemerintah Indonesia merespon lewat komitmen mereka pada Millenium Development Goals (MDGs).

Indonesia memiliki system sanitasi perkotaan yang terendah di Asia. Kurang dari 10 kota memiliki jaringan pembuangan limbah dan ini mencapai kurang lebih 1,3 % penduduk kota. Tingkat investasi publik pada sector sanitasi kurang , dan kurangnya tanggung jawab institusional yang jelas dan minat investasi pada sanitasi menunjukkan defisiensi struktural pada sektor itu. Perubahan peran dan kewajiban diperoleh dengan biaya dan desentralisasi fungsi, menjadikan institusional yang kurang jelas bertambah buruk.

Sampai sekarang, kebijakan lingkungan yang berarti kelalaian rumah tangga merupakan tanggung jawab dinas kebersihan. Sekarang 70% rumah tangga diperkotaan memiliki tempat sanitasi , kebanyakan dalam bentuk tangki septik yang tidak dibuat dengan benar atau tidak berfungsi dengan baik. Kurangnya investasi, kelalaian dan regulasi oleh pemerintah setempat, berarti bahwa pembangunan tempat pembuangan yang baik dan higienis dan pengolahan tangki septik jarang. Kebanyakan limbah mencari sendiri jalan saluran terbuka seperti sungai atau kanal, yang menghasilkan kontaminasi luas pada air tanah dan air permukaan diseluruh negara, dan mempengaruhi kelestarian penyediaan air baku. Menyebabkan peningkatan biaya penyediaan kebutuhan air.

Melihat cepatnya urbanisasi, pemerintah Indonesia mengakui krisis kebersihan kota. Bagaimanapun kurangnya kegiatan yang dilakukan selama ini. Maksudnya pemerintah relatif kekurangan sumber dan kekurangan kapasitas, strategi rinci, mekanisme pembiayaan dan pengembangan instusional yang jelas pada sektor tersebut. Berbagai inisiatif baru sedang dibicarakan, tetapi koordinasi masih terbatas. Tak ada strategi pemerintah yang jelas untuk menerima sanitasi MDG, tidak juga sektor pendekatan yang luas untuk memprakarsai kerangka keterlibatan donor.

Konsultasi Belanda tercapai awal tahun 2004, mengidentifikasi sub sektor sanitasi sebagai daerah dimana dana dari Belanda dapat di gunakan untuk manfaat yang signifikan, mengisi kekosongan yang kritis pada keberadaan teknis dan pendanaan terkait dengan sektor air yang lebih luas.

Keterbatasan lahan dan kawasan permukiman menyebabkan pemerintah berusaha maksimal untuk menyediakan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni, sehat dan aman bagi masyarakat terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif sangat tinggi, ditambah keterbatasan lahan perumahan dan permukiman akibat tingginya harga lahan, maka pemerintah bermaksud menata dan memperbaiki kondisi lingkungan melalui program pengembangan sektor sanitasi.

Dengan adanya kawasan - kawasan tersebut, perlu difikirkan pengelolaanya, termasuk pengelolaan limbah buangan. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan percontohan dengan pembuatan Sitem Pembuangan Air Limbah Terpusat di kawasan-kawasan permukiman kumuh dan permukiman sederhana guna mewujudkan prasarana dan sarana permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat.

Sementara itu kondisi eksisting yang ada saat ini berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap limbah adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih sangat rendah dengan demikian masyarakat belum banyak terlibat dalam pembangunan prasarana dan sarana air limbah.
- b. Pendidikan masyarakat yang rendah mengurangi kecepatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah.

- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan pembuangan air limbah setempat secara benar
- d. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang mencerminkan bahwa air limbah bukan merupakan isu penting bagi masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang kontinyu tentang limbah terhadap kesehatan masyarakat.
- e. Keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan prasarana dan sarana air limbah sering mengakibatkan pembangunan prasarana dan sarana limbah salah sasaran, tidak efisien, serta keberlangsungan (sustainability) operasionalisasi prasarana tidak dapat dijamin.

Mengingat keterbatasan yang ada serta kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman kumuh dan permukiman sederhana yang memadai dan memenuhi syarat teknis, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan Konsultasi Manajemen Teknis pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat di kawasan-kawasan kumuh dan permukiman sederhana.

Program air bersih dan sanitasi untuk Asia Timur dan Pasifik (WSP - EAP) berupaya merekrut konsultan, untuk memberikan pelayanan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan implementasi program pengembangan sektor sanitasi di Indonesia.

ISSDP mencoba mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun kerangka kerja pelayanan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, dengan penekanan tertentu pada pendekatan pro masyarakat miskin di perkotaan. ISSDP merupakan sub program 3 sampai 4 tahun (CY 2006 - 2009) untuk program air dan sanitasi (WASAP) dengan dana yang besar dari Belanda . Dana perwalian dilaksanakan oleh kantor Bank dunia di Jakarta. WSP - EAP bertanggung jawab terhadap implementasi sub program ISSDP.

Gambaran ringkas tentang Program Pengembangan Sektor Sanitasi ISSDP adalah :

a. Maksud & Tujuan program ISSDP

- Meningkatkan kondisi kesehatan, lingkungan dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin, melalui peningkatan pelayanan sanitasi
- Meningkatkan profil sanitasi di Indonesia, melalui:
 - Peningkatan awareness (pemerintah, masyarakat, NGOs, swasta)

- Pemantapan strategi
- Membaiknya tingkat investasi (penggalan dan mobilisasi dana pemerintah, swasta, NGOs, masyarakat)

b. Sasaran Proyek

Mantapnya kerangka kerja yang berkelanjutan bagi pelayanan sanitasi yang berpihak pada masyarakat miskin melalui pengembangan penyusunan kebijakan dan perencanaan strategi yang terpadu dan efektif, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan kesadaran.

c. Jangka Waktu, Pendanaan, dan Cakupan Proyek

- 3-4 tahun (2006-2009)
- Dana yang disediakan oleh negara donor (Pemerintah Belanda) dalam program ini sebesar ± US\$ 8 juta
- Untuk sementara akan dimulai dari sektor air limbah domestik. Selanjutnya akan juga mencakup persampahan dan drainase.
- Untuk sementara dilaksanakan di 6 kota yang telah dipilih berdasarkan mekanisme penjarangan minat: Payakumbuh, Jambi, Banjarmasin, Surakarta, Blitar, dan Denpasar.

d. Apa yang diperoleh dari ISSDP?

Paket lengkap:

1. Kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi perkotaan yang efektif dan terpadu
 - Efektif: disesuaikan dengan kondisi masing-masing kota berdasarkan pembelajaran dari keberhasilan di tempat lain
 - Terpadu: mulai dari kajian kebutuhan / permintaan, penyusunan strategi dan rencana aksi, penyadaran dan kampanye, uji coba & umpan balik pada penyempurnaan program
2. Rencana aksi pembangunan sanitasi perkotaan
3. Program kampanye penyadaran (pemerintah, publik, stakeholders lain) yang disesuaikan dengan rencana aksi
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sanitasi
5. Uji coba sebagai hasil nyata yang dapat direplikasi di lokasi-lokasi lainnya
6. Membuka kesempatan untuk memperbesar akses kepada sumber-sumber dana yang ada

7. Dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing.

e. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- ISSDP bukan semata program fisik / investasi. Penekanan utamanya justru pada pelengkapan dan pematapan strategi dan rencana aksi di tingkat daerah dengan didukung oleh program peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi.
- Setiap kota dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda baik dari cara pendekatan pembangunan sanitasinya maupun prioritas kegiatannya.
- Tim fasilitator dan ahli yang disediakan sifatnya dukungan perbantuan; arahan program sepenuhnya menjadi tugas pemerintah daerah melalui Pokja Sanitasi masing-masing (sesuai dengan lingkup dan cakupan ISSDP).

f. Harapan: untuk keberhasilan pembangunan sanitasi dan kesehatan masyarakat.

- Meningkatnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan sanitasi bukanlah “pos pengeluaran” semata, melainkan suatu “modal” bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
- Pematapan strategi, rencana aksi, dan komitmen semua pihak merupakan prasyarat sebelum pembangunan sanitasi dapat “lepas landas”.
- Pembangunan sanitasi hanya akan berkontribusi pada pencapaian MDG apabila dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan berkesinambungan.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

- (1) Menuangkan semua kegiatan dan temuan awal lapangan kedalam satu laporan.
- (2) Menggambarkan secara ringkas konsep-konsep awal dikaitkan dengan upaya-upaya penyelesaian masalah dibidang kesehatan lingkungan secara luas melalui aspek-aspek :
 - Pematapan strategi dan kebijakan yang diambil
 - Pengembangan fisik prasarana dan sarana sistem yang ada
 - Kampanye peningkatan awareness (pemerintah, masyarakat, NGOs, swasta)
 - Dorongan untuk membaiknya tingkat investasi (penggalan dan mobilisasi dana pemerintah, swasta, NGOs, masyarakat).

Tujuan dari penyiapan laporan awal adalah :

- (1) Kemudahan bagi pelbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk memahami persoalan sejak awal secara cepat.
- (2) Upaya awal dalam rangka koordinasi dan kerjasama yang lebih baik sehingga keinginan untuk adanya keterpaduan didalam melaksanakan kegiatan dibidang ini dapat terwujud secara nyata.

1.3. SISTIMATIKA LAPORAN

Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kota
3. Profil Sanitasi Kota
4. Profil kesehatan penduduk
5. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran/kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
6. Masalah Pendanaan Program Sanitasi
7. Kelembagaan & regulasi yang terkait dengan program sanitasi
8. Analisa awal terhadap situasi yang ada
9. Rumusan awal permasalahan & alternatif penyelesaian
10. Strategi Sanitasi Kota
11. Program Dinas
12. Konsolidasi Program Sanitasi Skala Kota
13. Konsep Rencana Kegiatan Pokja
14. Penutup

Laporan utama ini di lengkapi dengan dukungan data secara terpisah. Lampiran berisi data dan informasi yang bersifat mendukung semua pernyataan yang disampaikan didalam laporan utama.

1.4. PENDEKATAN & METODOLOGI

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyiapan Laporan Buku Putih ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan silaturahmi dengan Kepala Bapeko sebagai pejabat yang mewakili Walikota.

- b. Melakukan pertemuan dengan semua Anggota Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA Sanitasi). Dalam pertemuan disampaikan secara sederhana akan tetapi lengkap tentang maksud dan tujuan program ISSDP. Pertemuan dilanjutkan dengan tanya jawab dan penyampaian komentar ataupun masukan.
- c. Kunjungan ke lokasi-lokasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan kegiatan berikutnya. Dari kunjungan ini selain dapat mengetahui secara pasti keberadaan instalasi juga secara langsung melihat cara kerja dari system.
- d. Tinjauan juga dilakukan ke sebagian dari daerah pelayanan di pusat kota & daerah kumuh
- e. Tinjauan yang juga penting telah dilakukan adalah ke lokasi permukiman yang terletak ditepi sungai dan diatas sungai. Hal ini sangat penting mengingat kehidupan dikota Banjarmasin sekitar 40% berada disekitar dan diatas sungai, karena kota ini dikenal dengan kota seribu sungai.
- f. Diskusi kecil telah dilakukan untuk mengetahui secara langsung pemahaman masyarakat terkait kesehatan lingkungan.
- g. Diskusi yang bersifat teknis dan mendalam juga telah dilakukan dengan staf UPT-PAL. Diskusi telah memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Pemda kepada masyarakat dibidang ini.
- h. Penyiapan laporan telah diupayakan dilakukan secara bersama antara Pokja Sanitasi dan Fasilitator. Proses penyiapan laporan telah memakan waktu kurang lebih dua minggu dengan diawali penjelasan tentang pentingnya Laporan Awal serta bagaimana laporan akan disusun.
- i. Kerja sama semua pihak ternyata banyak memberikan hasil yang baik.

Dinas-dinas yang telah terlibat didalam penyiapan laporan adalah : PD PAL, PDAM, Kebersihan, Kimpras (Cipta Karya), Dinas Kesehatan, Bapedalda , Bapeko, Bagian Keuangan dan bahkan sektor-sektor / dinas / lembaga yang mendukung seperti : Dinas / Kantor Agama, MUI, Infokom , Statistik, Pemberdayaan, PKK, Diknas, Dinas Tata Kota, Kimpras (Bina Marga), PLN , BPN , Pertanian.

GAMBARAN UMUM KOTA

2.1. KONDISI GEOGRAFIAS DAN TOPOGRAFIS

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara $3^{\circ}15'$ sampai dengan $3^{\circ}22'$ lintang selatan dan $114^{\circ}98'$ sampai dengan $114^{\circ}98'$ bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berawa-rawa dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara sungai Barito dan dibelah dua oleh sungai Martapura. Sehingga seolah olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah sekitar 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominir oleh lembung dengan sisipan pasir halus dan endapan uluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

2.2. KONDISI WILAYAH ADMINISTRASI

Luas Kota Banjarmasin 72.00 km persegi atau 0,19% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 50 kelurahan.

Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan, Propinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan :

- Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
- Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan kondisinya Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada

2.3. KONDISI DEMOGRAFIS

2.3.1. Kependudukan

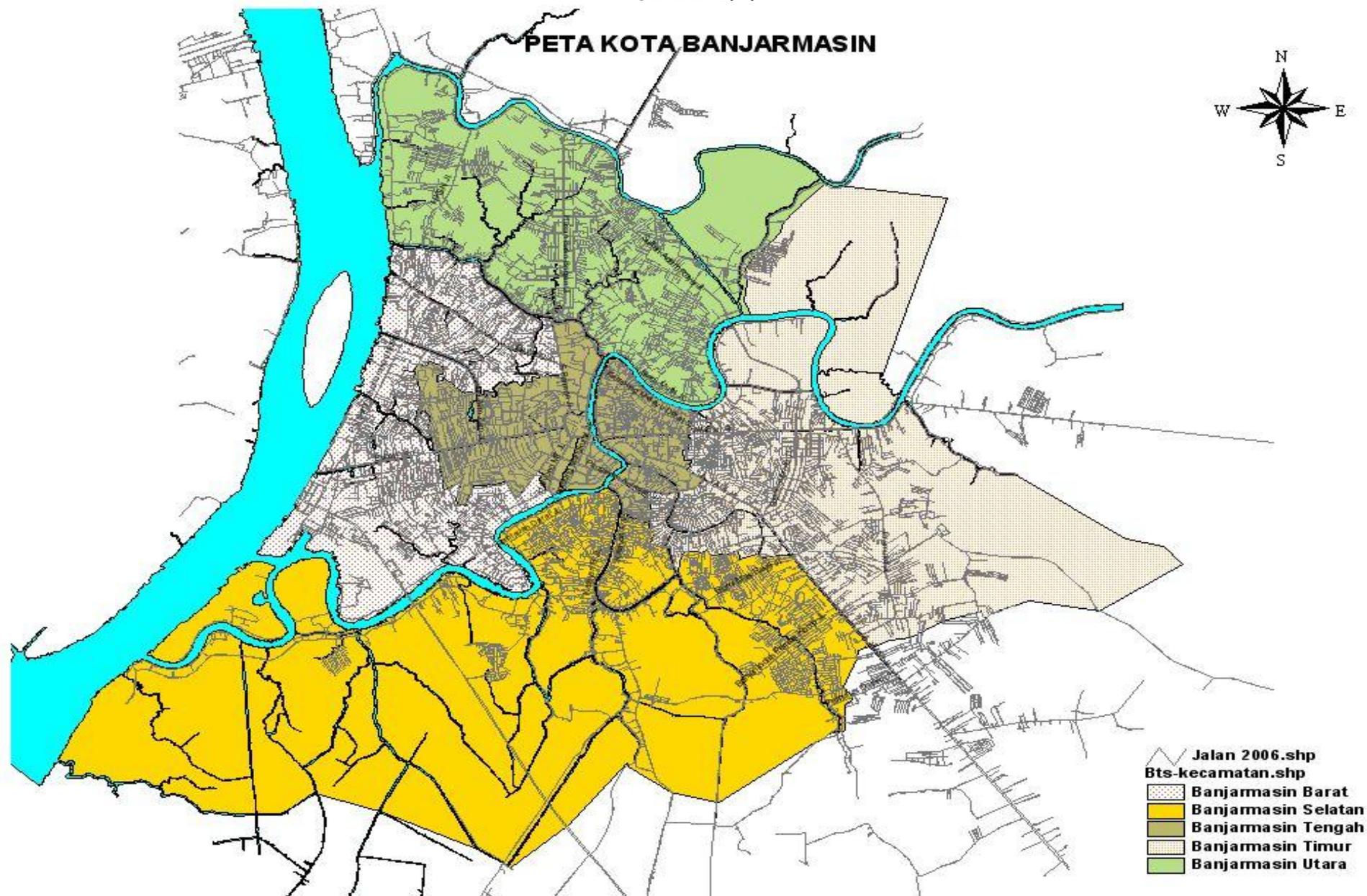
Pada tahun 2006 penduduk Kota Banjarmasin berjumlah 602.725 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki. 300.582 jiwa dan 302.143 jiwa perempuan.

Berdasarkan wilayah kecamatan maka hampir sekitar 48 persen penduduk Kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Barat yang mencapai 10.763 jiwa/km. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Laju pertumbuhan Penduduk secara alami dipengaruhi oleh Jumlah penduduk lahir, mati, dan migrasi. Berdasarkan hasil Sensus laju pertumbuhan Penduduk di wilayah Kota Banjarmasin mengalami penurunan sejak dua dasawarsa ini. Tercatat laju pertumbuhan penduduk tahun 1980-1990 sebesar 2,36 persen dan turun menjadi 1,02 persen pada periode tahun 1990- 2000.

Gambar 2.1.

PETA KOTA BANJARMASIN



Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Tahun/ Year 2006

Kecamatan/ <i>District</i>	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Jumlah Penduduk per	
		Km ²	Rumahtangga
(1)	(2)	(3)	(4)
01. <i>Banjarmasin Selatan</i>	144.349	7.153	4
02. Banjarmasin Timur	113.654	9.849	4
03. Banjarmasin Barat	143.898	10.763	4
04. Banjarmasin Tengah	110.105	9.443	4
05. Banjarmasin Utara	90.719	5.949	4
Jumlah/ <i>Total</i>	602.725	8.371	4

Sumber : BPS Kota Banjarmasin
Source : Statistics Of Banjarmasin City

2.3.2. Pendidikan

Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan penduduknya akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan. Guna mencapai pendidikan yang diharapkan diperlukan sarana dan prasarana serta unsur penunjang lainnya dalam proses pendidikan.

Tabel 2.2. memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah, jumlah guru, kelas dan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta pada lingkungan dinas pendidikan dan departemen agama di kota Banjarmasin.

Tabel 2.3. menggambarkan keadaan perguruan tinggi di Kota Banjarmasin. Jumlah perguruan Tinggi Negeri di wilayah ini sebanyak 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN Antasari. Perguruan Tinggi yang berstatus Swasta sebanyak 20 buah tercatat dibawah KOPERTIS Wilayah IX.

Tabel 2.2.
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru
Menurut Tingkat Pendidikan/
Number Of Schools, Classes, Pupils And Teachers
Tahun/Year 2005/2006

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 TK				
Negeri	1	6	171	18
Swasta	213	563	14229	837
02 Sekolah Dasar				
Negeri	249	1419	54135	2274
Swasta	32	241	8437	818
03 SLTP				
Negeri	34	461	16774	1185
Swasta	23	131	3721	433
04 SMU				
Negeri	13	201	7274	527
Swasta	17	163	5136	459
05 SMK				
Negeri	5	100	3853	313
Swasta	9	87	2726	270

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin.

Source : National Education Office Of Banjarmasin City

Tabel 2.3.
Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta/
Number Of Student Of Private University
Tahun/Year 2005/2006

Nama Perguruan Tinggi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. UNISKA	1.086	702	1.788
02. UVAYA	771	745	1.516
03. STEI Indonesia	74	84	158
04. STIE Nasional	711	651	1.362
05. STEI Panca Setia	461	233	694
06. STIMI	340	383	723
07. STKIP PGRI	531	1.272	1.803
08. STIH Sultan Adam	148	326	474
09. STIA Bina Banua	321	159	480
10. AMIK	307	181	488
11. AMNUS	69	87	126
12. Akademi Filsafat GKE	81	115	196
Jumlah/Total 2005/2006	4.900	4.908	9.808
2004/2005	8.116	6.457	14.973
2003/2004	5.744	6.645	12.389

2.3.3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tahun 2005 terdapat 10 Rumah sakit umum dan 1 rumah sakit bersalin.

Sarana Pusat kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 26 unit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu 31 unit. Untuk pengembangan sarana kesehatan dan jumlah sarana kesehatan per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Tabel 2.4.
Pengembangan Sarana Kesehatan/
Development Of Medical Infrastructure
Tahun/Year 2001 - 2004

Jenis Sarana	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
01. R.S. Umum	10	10	10
02. R.S. Jiwa	-	-	-
03. R.S. Bersalin	3	1	1
04. R.S. THT	-	-	-
05. Puskesmas	26	26	26
06. Puskesmas Pembantu	31	31	31
07. Puskesmas Keliling	21	21	22
08. BKIA	3	3	3
09. Posyandu	336	320	326
10. Apotik	71	79	94
11. Balai Pengobatan	40	47	56
12. Klinik	1	1	1

Tabel 2.5.
Jumlah Sarana Kesehatan per Kecamatan /
Number Of Medical Infrastructure By District
Tahun/Year 2004

Sarana Kesehatan	B.masin Selatan	B.masin Timur	B.masin Tengah	B.masin Barat	B.masin Utara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
01. R.S. Umum	1	4	3	2	1	10
02. R.S. Jiwa	-	-	-	-	-	-
03. R.S. Bersalin	1	-	-	-	-	1
04. R.S. THT	-	1	-	-	-	1
05. Puskesmas	6	6	5	5	4	26
06. Puskesmas Pembantu	11	5	2	6	7	31
07. Puskesmas Keliling	5	5	5	4	4	23
08. BKIA	-	-	-	-	-	-
09. Posyandu	68	72	60	68	66	334
10. Apotik	6	15	57	9	7	94
11. Balai Pengobatan	8	16	15	11	6	56
12. Klinik	-	-	-	1	-	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Source : Health Service Of Banjarmasin City

2.3.4. Perekonomian

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2005 diperoleh data pekerjaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Lapangan Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin

Lapangan Pekerjaan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
01.	Pertanian	4,14	1,13	5,27
02.	Pertambangan & Energi	1,63	0,78	2,40
03.	Industri	6,70	2,41	9,12
04.	Listrik, Gas dan Air	1,03	0,00	1,03
05.	Konstruksi	9,73	0,26	9,99
06.	Perdagangan	23,71	18,89	42,60
07.	Angkutan & Komunikasi	8,63	0,00	8,63
08.	Keuangan	1,06	0,81	1,87
09.	Jasa-Jasa	12,47	6,29	18,76
10.	Lainnya	0,33	0,00	0,33
	Jumlah	69,44	30,56	100,00

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2005 diperoleh data PDRB sebagai berikut :

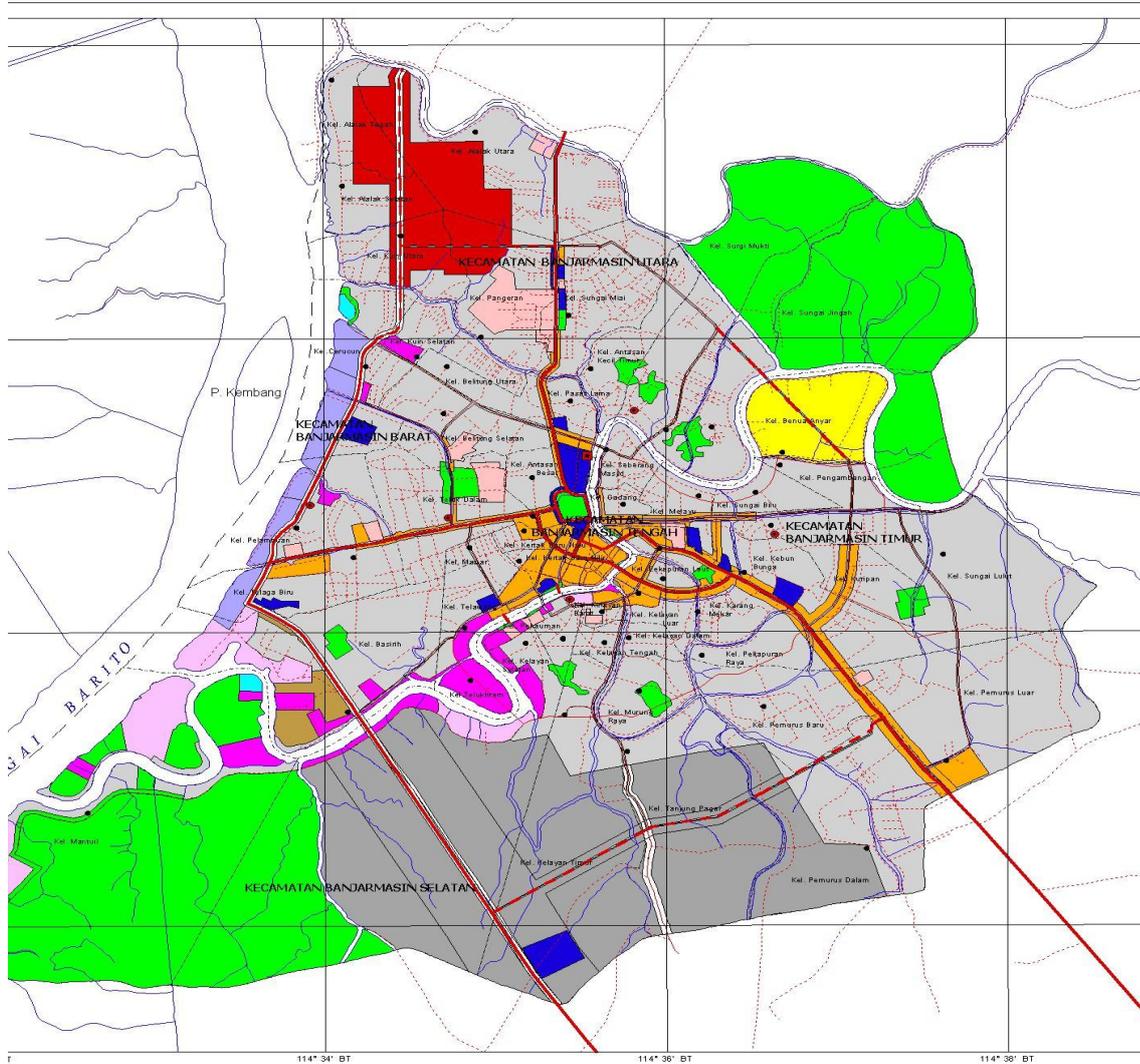
Tabel 2.7.
Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
	(Juta Rp)	(persen)
2003	3.954.131	11,48
2004	4.332.180	9,56
2005	5.000.890	15,44

Adanya kelesuan ekonomi akibat krisis moneter yang berkelanjutan, menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak masyarakat miskin perkotaan. Sehingga berkembang permukiman kumuh yang berakibat semakin menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Terkait dengan rencana tata ruang kota Banjarmasin sesuai Perda yang ada, dan perda yang terbaru masih dalam proses.

Gambar 2.2.
Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Banjarmasin
Tahun 2011



PROFIL SANITASI KOTA

3.1. GAMBARAN KONDISI KESEHATAN LINGKUNGAN

3.1.1. Sanitasi umum : gambaran daerah dikaitkan dengan kondisi kesehatan lingkungan, termasuk daerah yang mengalami pencemaran berat (hot spot).

Dari jumlah penduduk kota Banjarmasin pada tahun 2003 sekitar 18,50% (Sumber : Studi - Bappeko) adalah keluarga miskin. Dari peta dapat dilihat lokasi-lokasi konsentrasi masyarakat miskin, dan sudah bisa dipastikan fasilitas sanitasi yang ada disana sangat kurang dan kumuh.

Menurut hasil study dan sosialisasi pengembangan rumah susun kota Banjarmasin Tahun 2003 ada 6 kriteria penilaian kawasan kumuh :

1. Kepadatan penduduk
2. Kesesuaian RUTRK
3. Lokasi strategis
4. Kepadatan bangunan
5. Tata letak bangunan
6. Status lahan

Dari penilaian total kriteria tersebut disimpulkan bahwa ada beberapa kelurahan yang masuk dalam klasifikasi yang menjadi sasaran studi ini :

- A. Kelurahan dengan kondisi kumuh "Sangat tinggi (ST)" adalah :
1. Kelurahan Kelayan dalam
 2. Kelurahan Kelayan tengah
 3. Kelurahan Belitung Selatan

B. Kelurahan dengan kondisi kumuh "Cukup Tinggi (CT)" adalah :

1. Kelurahan Murung Raya
2. Kelurahan Kelayan Barat
3. Kelurahan Karang mekar
4. Kelurahan Kuripan
5. Kelurahan Belitung Utara
6. Kelurahan Kelayan Luar
7. Kelurahan Teluk Dalam
8. Kelurahan Gedang
9. Kelurahan Seberang Mesjid
10. Kelurahan Melayu

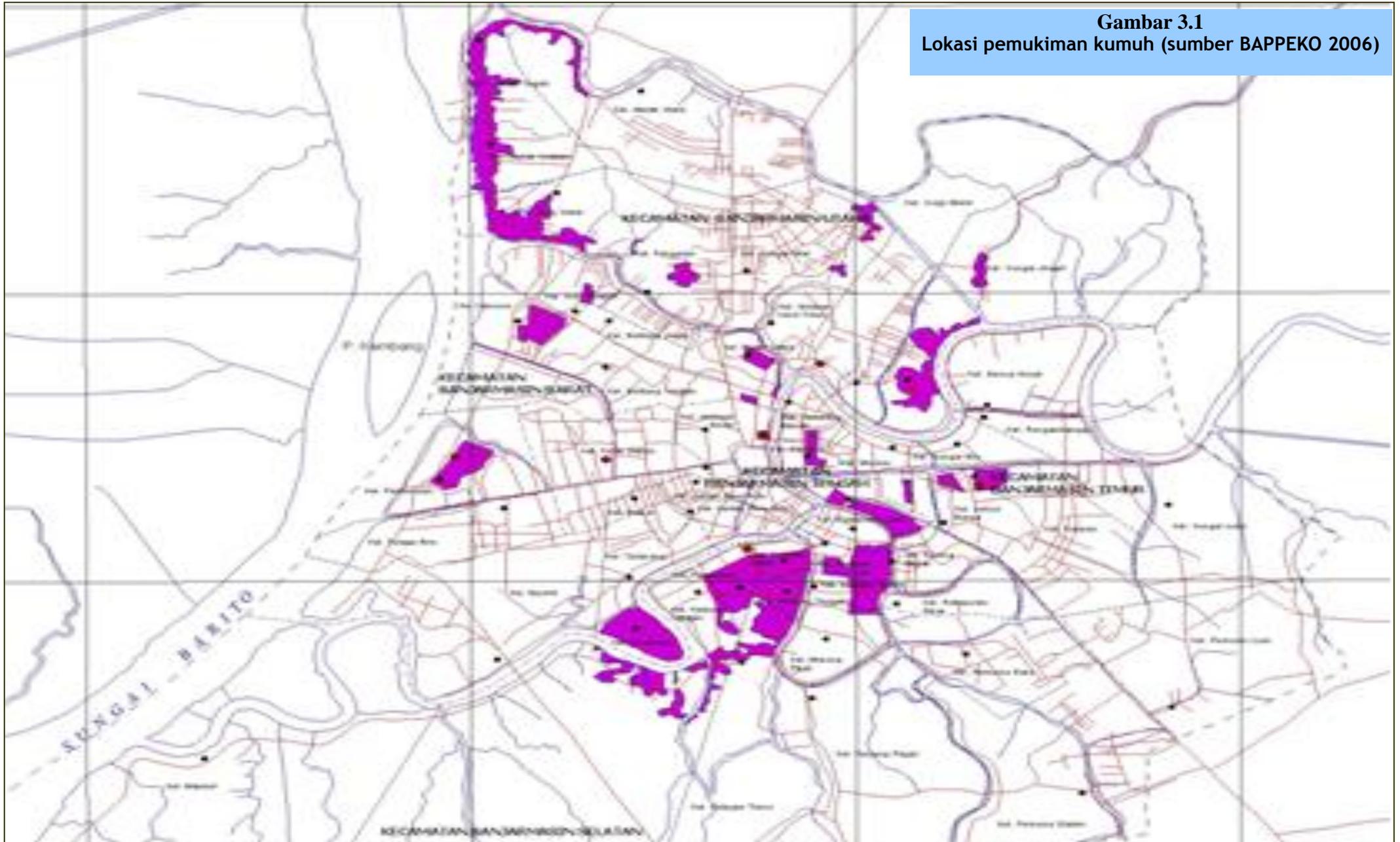
C. Pemerintah mempunyai konsep penanganan lingkungan permukiman kumuh :

1. Terintegrasi dan menyeluruh
2. Upaya pemberdayaan dan permampuan
3. Pembangunan yang berkelanjutan
4. Pembangunan bertumpu pada masyarakat
5. target utama : perempuan dan anak-anak
6. Membangun tanpa menggusur

D. Ditambah lagi dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis "TRIDAYA"

- Tumbuhnya keswadayaan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
- Meningkatnya ekonomi masyarakat

Gambar 3.1
Lokasi pemukiman kumuh (sumber BAPPEKO 2006)



3.1.2. Kualitas air : gambaran kualitas air permukaan & air tanah

a) Kualitas air permukaan

Kualitas air permukaan di kota Banjarmasin sangat bervariasi. Keadaan demikian tergantung dimana sungai tersebut berada serta fungsi / pemanfaatan sungai tersebut. Ada sungai yang terletak di daerah yang penduduknya padat kemudian sungainya sempit, sehingga banyak sekali terdapat sampah atau buangan yang dihasilkan oleh masyarakat seperti buang hajat dibuang ke sungai, keadaan demikian karena terbatasnya fasilitas penampungan sampah sementara, terbatasnya tempat buang hajat yang memenuhi syarat sanitasi atau karena sikap dan perilaku masyarakat yang kurang baik. Kemudian ada sungai yang terletak didaerah kawasan industri sehingga limbah / hasil buang industri tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pencemaran air sungai/air permukaan.



Namun sebagian besar air sungai terutama sungai yang membentang di Kota Banjarmasin, atau yang disebut dengan sungai Martapura keadaanya masih belum mengkhawatirkan, walaupun fungsinya tidak bisa secara langsung digunakan seperti untuk keperluan minum (Kelas I), namun setelah melalui proses pengolahan oleh PDAM air tersebut layak untuk diminum.

Pada daerah tertentu air sungai Martapura yang jauh dari industri masih digunakan oleh PDAM untuk keperluan air bersih masyarakat, seperti di daerah sungai sungai bilu atau Banua Anyar.



Hasil pemantauan kualitas air permukaan terutama air sungai digunakan beberapa parameter sesuai dengan PP No. 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter pemeriksaan kualitas air permukaan yang digunakan sebanyak 26 parameter, yaitu dengan membandingkan hasil analisis pemeriksaan dengan Baku Mutu Air sesuai dengan Kelas yang ditentukan (Kelas I, II, III, IV). Adapun parameter yang digunakan terutama untuk pemeriksaan kualitas fisik dan kimia, sedangkan untuk pemeriksaan biologis biasanya dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan atau UPT Dinas Kesehatan.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa air sungai / permukaan di Kota Banjarmasin masih belum ditentukan kelas peruntukannya, hal ini karena masih dalam proses pemantauan dan proses pengkategorian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, namun sebagian besar sungai-sungai di Kota Banjarmasin masih digunakan untuk keperluan sehari-hari terutama sungai yang ukurannya cukup lebar dan dalam serta airnya mengalir seperti sungai Martapura, Sungai Barito, Sungai Andai, Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan dan beberapa sungai lain yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satu contoh hasil pemeriksaan kualitas air sungai di Kota Banjarmasin pada Triwulan terakhir tahun 2006 :

Tabel 3.1.
Pemeriksaan Sampling Air Sungai

Sample /No. : *Air S.Martapura lokasi Banua Anyar*
Air S.Mulawarman lokasi Suaka Insan (4)
Tgl. Sampling : *07 Desember 2006, Pukul 13.45 Wita*

NO.	PARAMETER	SATUAN	HASIL ANALISIS	Kelas			
				I	II	III	IV
1	Temperatur	°C	29,6	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5
2	Residu Terlarut	mg/L	173	1000	1000	1000	2000
3	Residu Tersuspensi	mg/L	58	50	50	400	400
4	pH	-	6,21	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	5,0-9,0
5	BOD	mg/L	3,66	2	3	6	12
6	COD	mg/L	18,5	10	25	50	100
7	DO	mg/L	3,83	6	4	3	0
8	Total Fosfat sbg P	mg/L	0,035	0.2	0.2	1	5
9	NO ₃ sbg N	mg/L	0,269	10	10	20	20
10	NH ₃ -N	mg/L	0,121	0.5	(-)	(-)	(-)
11	Kobalt	mg/L	0,006	0.2	0.2	0.2	0.2
12	Boron	mg/L	0,038	1	1	1	1
13	Kadmium	mg/L	0,005	0.01	0.01	0.01	0.01
14	Khrom (VI)	mg/L	tt	0.05	0.05	0.05	1
15	Tembaga	mg/L	0,015	0.02	0.02	0.02	0.2
16	Besi	mg/L	0,538	0.3	(-)	(-)	(-)
17	Timbal	mg/L	tt	0.03	0.03	0.03	1
18	Mangan	mg/L	0,004	0.1	(-)	(-)	(-)
19	Air Raksa	mg/L	tt	0.001	0.002	0.002	0.005
20	Seng	mg/L	0,022	0.05	0.05	0.05	2
21	Khlorida	mg/L	23,7	600	(-)	(-)	(-)
22	Fluorida	mg/L	0,205	0.5	1.5	1.5	(-)
23	Nitrit sbg N	mg/L	0,018	0.06	0.06	0.06	(-)
24	Sulfat	mg/L	15,1	400	(-)	(-)	(-)
25	Minyak dan Lemak	ug/L	tt	1000	1000	1000	(-)
26	Senyawa fenol sbg fenol	ug/L	tt	1	1	1	1

Sumber data : Bapedalda Kota Banjarmasin Tahun 2006.

Sebagai salah satu contoh air sungai / air permukaan yang masih banyak digunakan oleh masyarakat maupun PDAM sebagai bahan baku adalah air sungai Martapura tidak bisa dikatakan sangat tercemar, karena dari hasil analisis pemeriksaan baik secara fisik maupun kimia sebagian besar cukup

baik dan memenuhi standar baku mutu air yang ditentukan, terutama untuk golongan II, III, dan IV.

b) Kualitas air tanah

Sangat tercemar karena pembuangan hajat yang tidak mengikuti aturan, banyak tangki septik yang tidak sesuai/salah. Pada umumnya masyarakat menggunakan cubluk untuk penampungan tinja, sedangkan cubluk tidak dibenarkan untuk lahan pasang surut atau daerah dengan permukaan air tanah tinggi.

3.1.3. Sub Sektor drainase : gambaran penanganan daerah tergenang / banjir

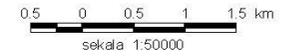
Pada musim hujan dimana curah hujan cukup besar dan diikuti oleh pasang naik, maka hampir seluruh Kota Banjarmasin tergenang air. Genangan yang terjadi dibedakan menjadi dua; yang pertama adalah akibat pasang air laut dan yang kedua disebabkan oleh air hujan yang berlangsung 4 - 5 jam. Lokasi beberapa genangan dan penyebab terjadinya genangan di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 1 Drainase, terlampir.

Program pengendalian banjir :

- Pengembangan sistem drainase dengan membuat Banjarmasin Drainage Master Plan (BDMP)

RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN 2001 - 2011

JARINGAN DRAINASE



Peta No.

KETERANGAN :

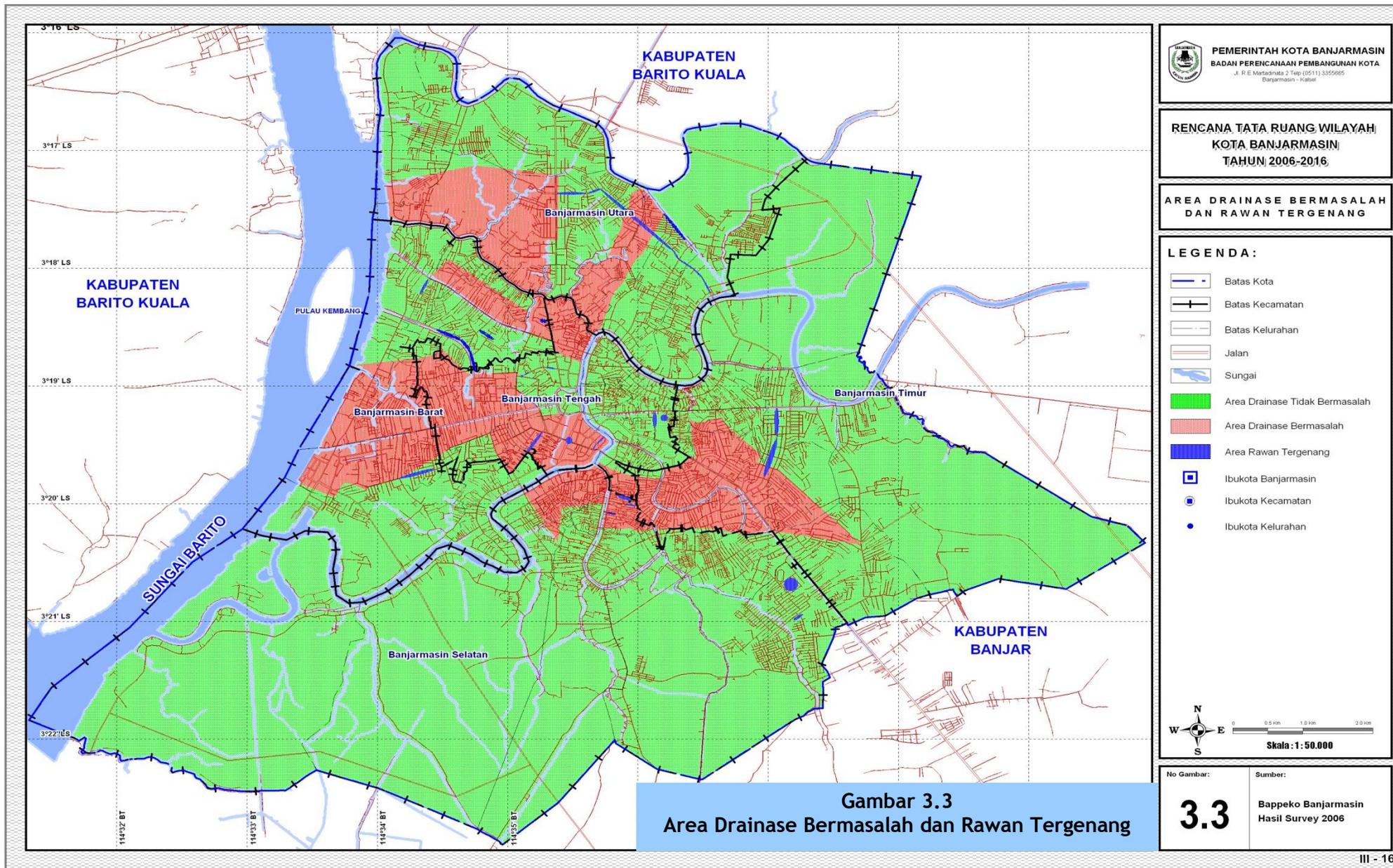
- Ibukota Banjarmasin
- Ibukota Kecamatan
- Kantor Kelurahan
- - - Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Jaringan Drainase

Sumber :
- Bappeko Banjarmasin



PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

Gambar 3.2
Jaringan Drainase di Kota Banjarmasin



RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN 2001 - 2011

PERMASALAHAN DRAINASE



0 0,5 1 1,5 km
sekala 1:50000

Peta No.

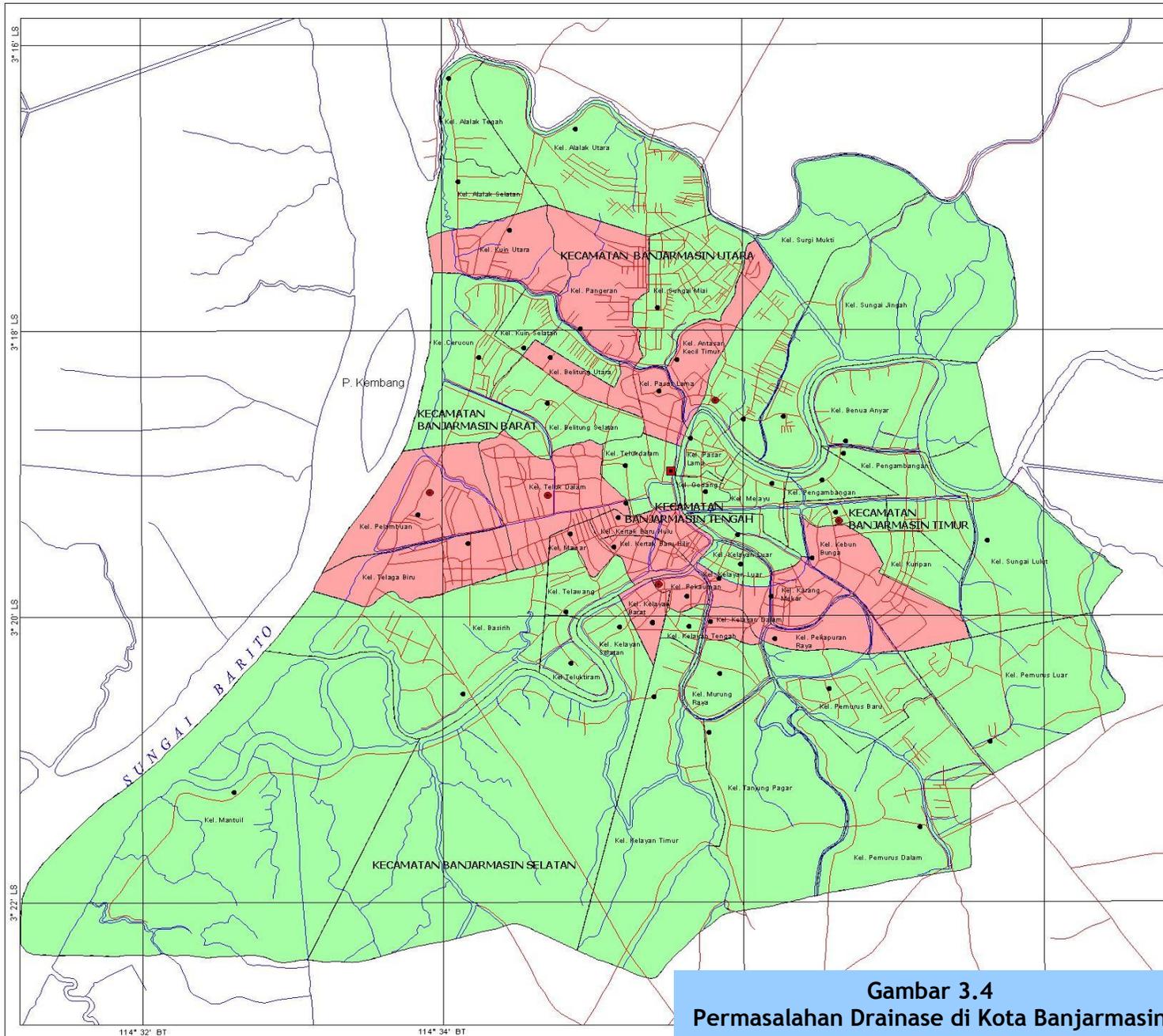
KETERANGAN :

- Ibukota Banjarmasin
- Ibukota Kecamatan
- Kantor Kelurahan
- Batas Kota/Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Drainase bermasalah
- Drainase tidak bermasalah

Sumber :
- Hasil Analisis



PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN



Gambar 3.4
Permasalahan Drainase di Kota Banjarmasin

3.1.4. Sub Sektor sampah : gambaran penanganan sampah

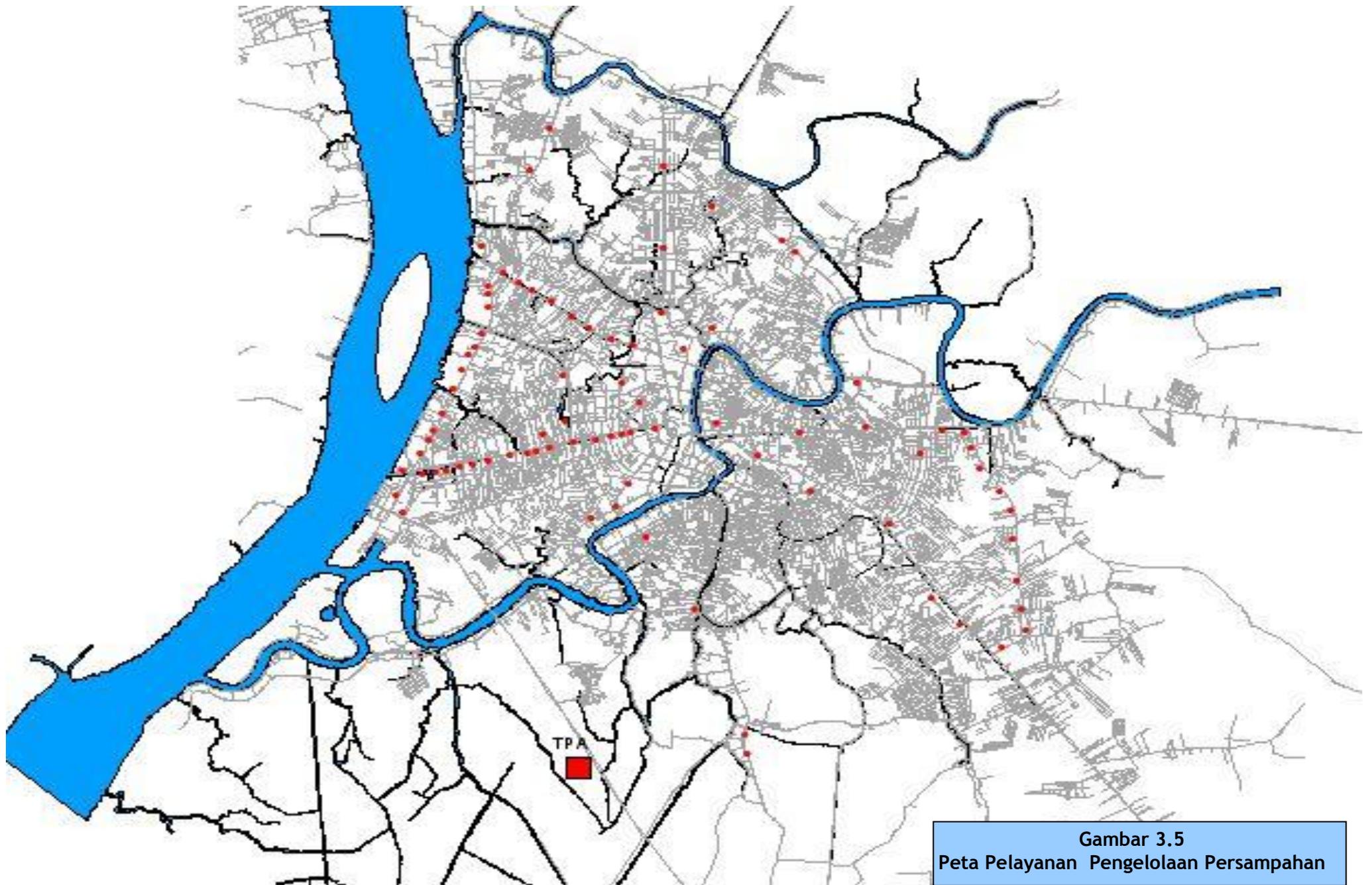
Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 602,725 jiwa dan akan terus bertambah, perkiraan sampah setiap hari yang dihasilkan masyarakat Kota Banjarmasin dengan asumsi setiap orang menghasilkan volume sampah 3 liter/orang/hari atau 0,003 m³(standar nasional), maka produksi sampah Kota Banjarmasin akan mencapai lk.1,507 m³/hari. Namun demikian menurut perkiraan kami, produksi sampah di Kota Banjarmasin belum mencapai 3 liter/orang/hari, diperkirakan hanya 2,5 liter/orang/hari, hal ini disebabkan karena tingkat ekonomi/penghasilan masyarakat kita sebagian masih rendah.



Sehubungan dengan ini, kami memperkirakan produksi sampah di Kota Banjarmasin lk. 602,725 orang x 2,5 liter = lk.1.506.812,5 liter/hari atau 1.507 m³, yang baru terlayani/terangkut lk.50 % atau sekitar 753,5 m³/hari yang berada di lingkungan/dalam wilayah perkotaan, sedangkan 50 % yang berada dipinggiran perkotaan belum dapat terlayani/terangkut, oleh warga/masyarakat sampah tersebut dibuang sendiri, atau dijadikan urugan halaman, dibakar, bahkan ada yang dibuang kesungai

Perkiraan cara penanganan sampah oleh masyarakat kota adalah sebagai berikut:

- 50 % sampah yang tertanggulangi (dikirim ke TPA)
- 10 % sampah yang dimanfaatkan
- 40 % sampah dibuang sembarangan/belum tertangani



Gambar 3.5
Peta Pelayanan Pengelolaan Persampahan

3.1.5. Sub Sektor tinja : gambaran penanganan tinja dan limbah domestik

Dulu akses jalan darat di Banjarmasin sangat terbatas, sehingga pada umumnya masyarakat bermukim di daerah pesisir sungai. Dengan demikian maka fasilitas sanitasi juga ikut disungai. Hampir seluruh penduduk di pesisir sungai menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari, juga untuk buang hajat dan sampah. Berdasarkan hasil sampling EHRA di Kota Banjarmasin , kami menyimpulkan penanganan tinja penduduk Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Penanganan Tinja di Kota Banjarmasin

	Terakhir kali BAB (%)	Fasilitas malam hari (%)	Fasilitas siang hari (%)
Jamban siram/ leher angsa disalurkan ke			
sewerage	1,9	1,8	1,8
tangki septik	26,8	26,8	26,8
cubluk	41,8	42,4	42,4
lobang galian	1,2	1,4	1,4
sungai/ kali/ parit	3,4	3,6	3,6
kolam	0,1	0,2	0,2
tidak tahu kemana	0,2	0,2	0,2
Jamban non siram/ tanpa leher angsa salurkan ke			
tangki septik	0,1	0,1	0,1
cubluk	1,8	2,0	2,0
lobang galian	0,4	0,5	0,5
sungai/kali/parit	8,2	10,1	10,1
tak tahu kemana	0,1	0,1	0,1
Gantung di atas sungai/ kolam	12,6	11,5	11,5
Tidak ada fasilitas: Di sungai/ kali/ parit/ got	0,6	0,5	0,5
Di tempat ibadah	0,0	0	0
Di fasilitas jamban umum	0,5	0	0

Data diatas berdasarkan hasil sampling terhadap 50 kelurahan. Ada kekeliruan presepsi terkait dengan tangki septic yang ada umumnya masih dikategorikan sebagai cubluk, hanya sedikit sekali yang benar-benar sebagai tangki septic (hanya sebagai percontohan).

3.1.6. Kondisi Kualitas Udara : gambaran pencemaran udara

Tabel 3.3.
Gambaran Pencemaran Udara

Lokasi pengukuran : Depan Kantor PDAM, Jl. A. Yani Km. 2,5 Bjm
Tgl : 19 Desember 2005

No	Parameter	Kadar	BM	Metoda	Peralatan	Tanggal /Waktu	Suhu	Rh	Kec.Angin	Ket
		(ug/Nm 3)	(ug/Nm 3)			(WITA)	0 C	(%)	(m/det)	
1	Kebisingan	73,27	63,9 - 78,4	70	ISO	Sound Level	16.00 - 19.00	29,0	75	> BM
2	Nitrogen	115,73	400	Zaltman	Spektro photo meter	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	< BM
3	Sulfur	301,68	900	Pararosanilin	Spektro photo meter	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	> BM
4	Carbon	573,74	30.000	Iodine pentoksida	Spektro photo meter	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	< BM
5	Timah Hitam	0,41	2	Ekstraktif	Spektro photo meter	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	< BM
6	TSP (debu total)	397,42	230	Gravimetri	Hi-Vol	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	> BM
7	PM 10	199,93	150	Gravimetri	Hi-Vol	16.00 - 19.00	29,0	75	0,76	> BM

3.1.7. Penanganan Limbah Industri / tambang

Banyak industri besar di Banjarmasin, antara lain: industri kayu, karet, batubara, dan buangan dari industri-industri ini ada yang ke sungai juga ke udara. Sangat disayangkan data-data terkait dengan kualitas air permukaan, air tanah dan udara belum dilakukan oleh Bapedalda dan Dinas Kesehatan. Industri-industri ini umumnya belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah dan instalasi untuk mengurangi pencemaran udara.

3.2. SISTEM YANG ADA (KONDISI SARANA & PRASARANA PRIBADI & UMUM)

3.2.1. Air Bersih

Sistem penyediaan air bersih PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin menggunakan sistem pengolahan lengkap, terdiri dari dua instalasi utama dan beberapa instalasi mini (*Mini Treatment Plan*) yang berada disekitar wilayah Kota Banjarmasin. (*Diagram sistem air bersih, lihat lembar berikutnya*)

Instalasi utama I (IPA A.Yani) berlokasi di jalan A.Yani Km. 2.5, mulai dikembangkan oleh Pemerintah Prancis tahun 1972 memiliki kapasitas sebesar 416 lt/dt, yang terdiri dari ; Unit pengolahan, reservoir dan unit distribusi. Pasokan air baku IPA A.Yani bersumber dari Intake Sungai Bilu dan Intake Pematang Panjang serta intake Sungai Tabuk.



Bangunan Instalasi Pengolahan Air A.Yani Kaps. 416 lt/dt

Tahun 1997 dilaksanakan penambahan kapasitas melalui pembangunan MTP sebesar 50 lt/dt, dan tahun 2002 pemindahan MTP 60 lt/dt dari Sutoyo S, S.Parman dan Kayutangi ke IPA A.Yani, sehingga total kapasitas IPA A.Yani adalah 526 lt/dt.



MTP 50 lt/dt lokasi IPA A.Yani



MTP 3 x 20 lt/dt lokasi IPA A.Yani

Instalasi Utama II (IPA Pramuka) pembangunannya dimulai tahun 1993 dan mulai beroperasi tahun 1995, pelaksanaannya melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Itali.

Kapasitas terpasang IPA Pramuka sebesar 500 lt/dt dengan pasokan air baku bersumber dari Intake Pematang Panjang dan Intake Sungai Tabuk.



Unit Pompa Intake Pematang Panjang



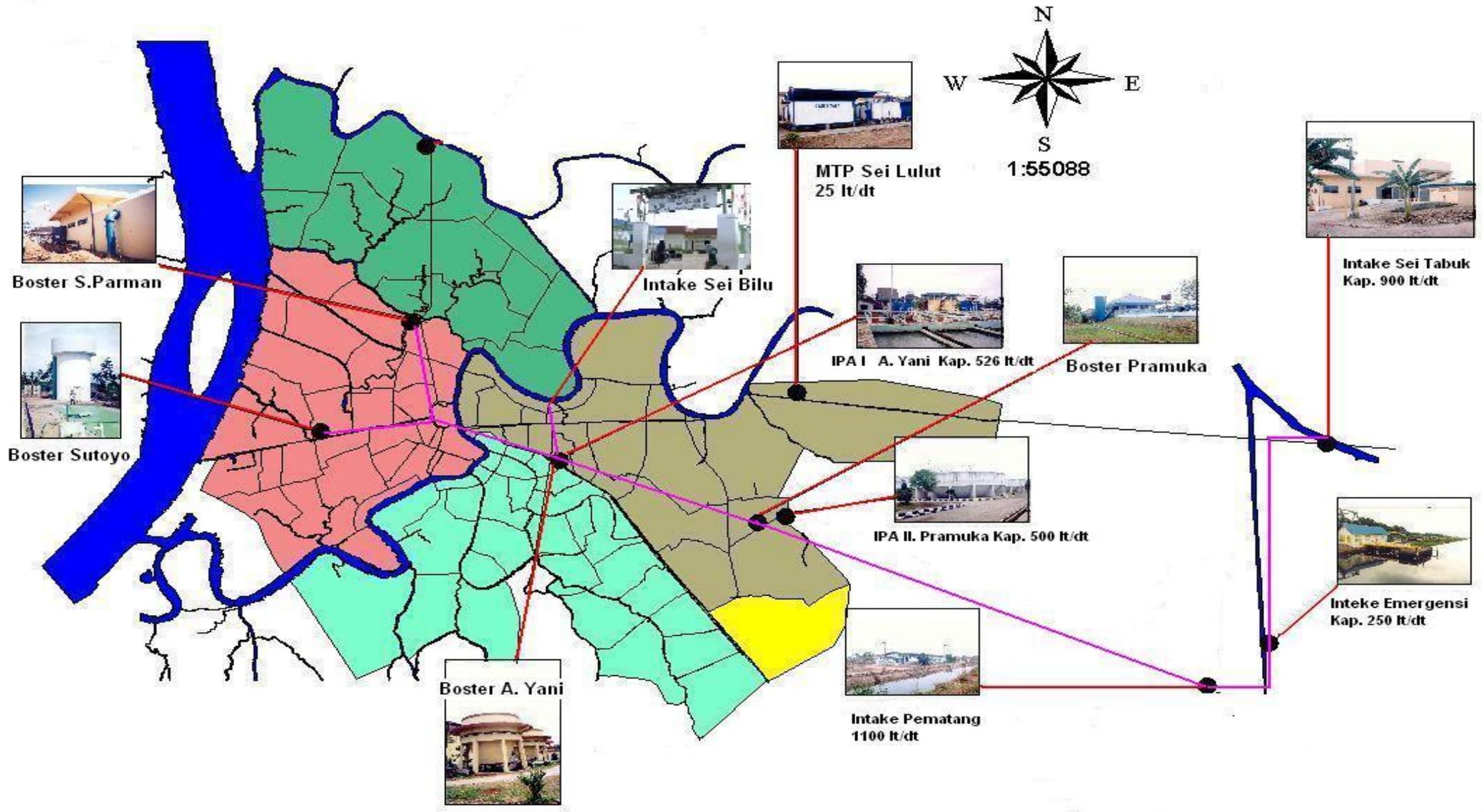
Clariflocculator 500 lt/dt IPA Pramuka

Pada pertengahan tahun 2006 telah dioperasikan IPA II Pramuka tahap ke II dengan kapasitas 500 Lt/dt, sehingga total kapasitas PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar 1.571 lt/dt.

Tabel 3.4.
Instalasi Pengolahan Air

Instalasi Pengolahan Air	Kapasitas Produksi
IPA A.Yani	526
IPA Pramuka + IPA Tahap II	500 + 500
MTP Kayutangi	20
MTP Sungai Lulut	25

Lokasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Intake Air Baku PDAM Banjarmasin



PETA JARINGAN PIPA PENDISTRIBUSIAN
PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN



Jaringan pipa transmisi dan distribusi yang ada menggunakan pipa mulai yang berdiameter 50 mm sampai 950 mm dengan panjang keseluruhan 731.588 meter. Sedangkan bahan pipa yang dipergunakan jenis PVC, GIP, DCIP, Steel dan FGRP.

Tingkat kehilangan air saat ini 28,56% dengan rasio operasi sebesar 104% tahun 2005. Jumlah karyawan PDAM keseluruhan sebanyak 342 orang dengan komposisi sarjana/diploma 28% sisanya non sarjana, rasio karyawan 4,03/1.000 pelanggan.

Tabel 3.5.
Jenis Pelanggan PDAM Bandarmasih

No	Klasifikasi		Tahun					
			2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	SOSIAL	Umum	708	771	840	1.172	1.233	1.299
		Khusus	603	636	656	321	339	447
2	NON NIAGA/ RUMAH TANGGA		44.112	53.756	60.132	66.503	71.787	77.901
3	NIAGA	Kecil	1.789	1.983	2.058	1.972	2.087	2.590
		Menengah	1.043	1.231	1.421	1.785	1.982	2.485
		Besar	490	491	479	460	461	456
4	INDUSTRI	Kecil	31	31	29	16	16	14
		Besar	15	15	14	15	15	22
Jumlah			48.791	58.914	65.629	72.244	77.920	85.214

Salah satu indikator penilaian tinggi rendahnya tingkat pelayanan yang di ukur di dalam bidang air bersih adalah rasio pengaliran air bersih ke pelanggan. Hasil Pengukuran ini masih bersifat sementara, karena jumlah sampel masih dianggap belum mewakili keseluruhan wilayah pelayanan.

Tabel 3.6.
Rasio pengaliran (jam/hari) berdasarkan hasil pengukuran

No	Titik Pantau (DS)	Wilayah	Blok	Rasio (jam/hari)
I	- 4012256	Banjarmasin Barat	118	21,8
	- 1023662	Banjarmasin Barat	110	24
	- 1011108	Banjarmasin Barat	112	24
II	- 4012603	Banjarmasin Utara	408	23,8
	- 4012816		408	24
	- 4017005		410	24
III	- 2007384	Banjarmasin Selatan	218	23,5
	- 2003024		215	24
	- 2015982		217	23
IV	- 3022572	Banjarmasin Timur	301	24
	- 3011297		316	24
V	- 3022215	Kabupaten Banjar	330	24
				284,1
Rata-rata rasio (jam/hari)				23,67
Prosentase (%)				98,63

Pengambilan titik-titik pantau (sampel) ini di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan dianggap dapat mewakili blok-blok lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan untuk rasio pengaliran 24 jam pada pelanggan-pelanggan PDAM Bandarmasih sudah mencapai **98,63 %**.

Dari data pemantauan EHRA ternyata 70% penduduk menyatakan tidak mendapatkan pelayanan selama 24 jam, dengan demikian hasil pengukuran tekanan diatas masih diragukan. Memang kegiatan pengukuran belum selesai menurut rencana akan berakhir pada bulan Agustus 2007.

3.2.2. Persampahan

Penanganan sampah di Kota Banjarmasin masih menggunakan pola lama yang dikenal dengan sistem 3P yaitu :

1. Pengumpulan Sampah

- Dilingkungan pemukiman; sampah dibersihkan,disapu dan dikumpulkan atas partisipasi warga, untuk dibuang/diangkut ke TPS terdekat

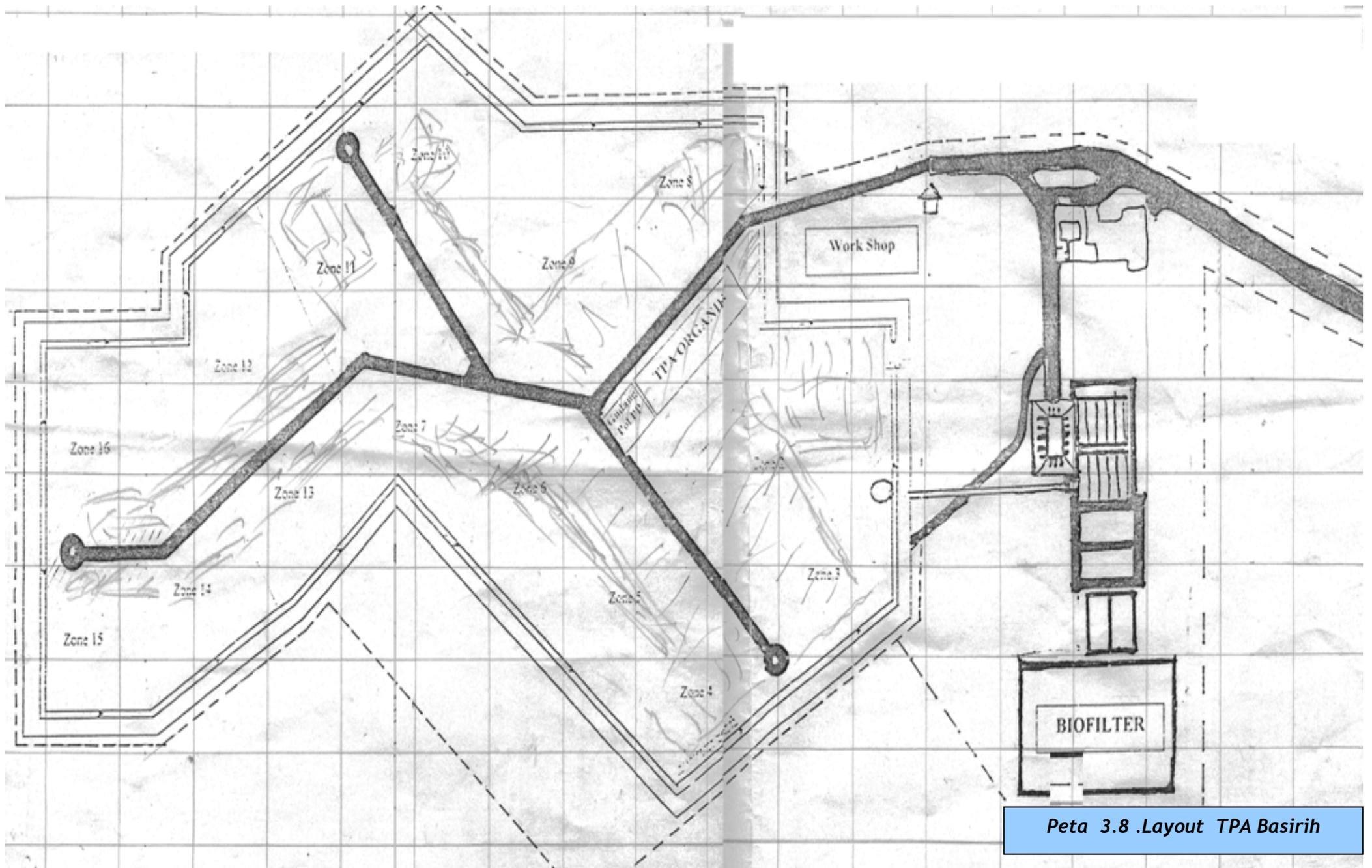
- Dilingkungan tempat tempat umum, jalan dan sungai kecil dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lasam, untuk selanjutnya diangkut ke TPS dan ke TPA



Pembersihan di tempat umum

2. Pengangkutan Sampah

- Sampah-sampah yang telah terkumpul di TPS-TPS selanjutnya diangkut/dibuang ke TPA Basirih dengan menggunakan truck sampah (24 bh yang operasional dan 5 bh Arm Roll ditambah 8 Container).



Peta 3.8 .Layout TPA Basirih

3. Pemusnahan Sampah

- Kegiatan pemusnahan sampah dilakukan dengan system Controlled Landfill, yaitu: sampah diletakkan pada Zona yang telah ditentukan dan selanjutnya ditutup dengan tanah dengan menggunakan 1 Buldozer dan 1 buah Exavator, namun karena kondisi TPA Basirih Kota Banjarmasin berada di daerah rawa dan truk sering amblas, sampah yang sudah bercampur tanah dihampar dan diratakan, hingga terjadi proses pembusukan dan pengeringan

Tabel 3.7.

Sarana pendukung operasional pengelolaan sampah

No	Tempat Pemindahan	Jumlah
1	TPS	107
2	Trasfer Depo	6

(Data Tahun 2006)

Tabel 3.8.

Dan peralatan pendukung

NO	JENIS KENDARAAN	OPERASIONAL	RUSAK BERAT/RINGAN	JUMLAH
1.	Dump Truck	24 buah	7 buah	31 buah
2.	Arm Roll	5 buah	2 buah	7 buah
3.	Truck Angkle	-	1 buah	1 buah
4.	Alat Berat	2 buah	4 buah	6 buah
5.	Pick Up Container	1 buah	-	1 buah
6.	Pick Up Standar	-	1 buah/1 buah	2 buah
7.	Truck Tinja	1 buah	-	1 buah
8.	Kijang Station	1 buah	-	1 buah
9.	Sepeda Motor	6 buah	1 buah	7 buah
	JUMLAH	40 buah	17 buah	57 buah

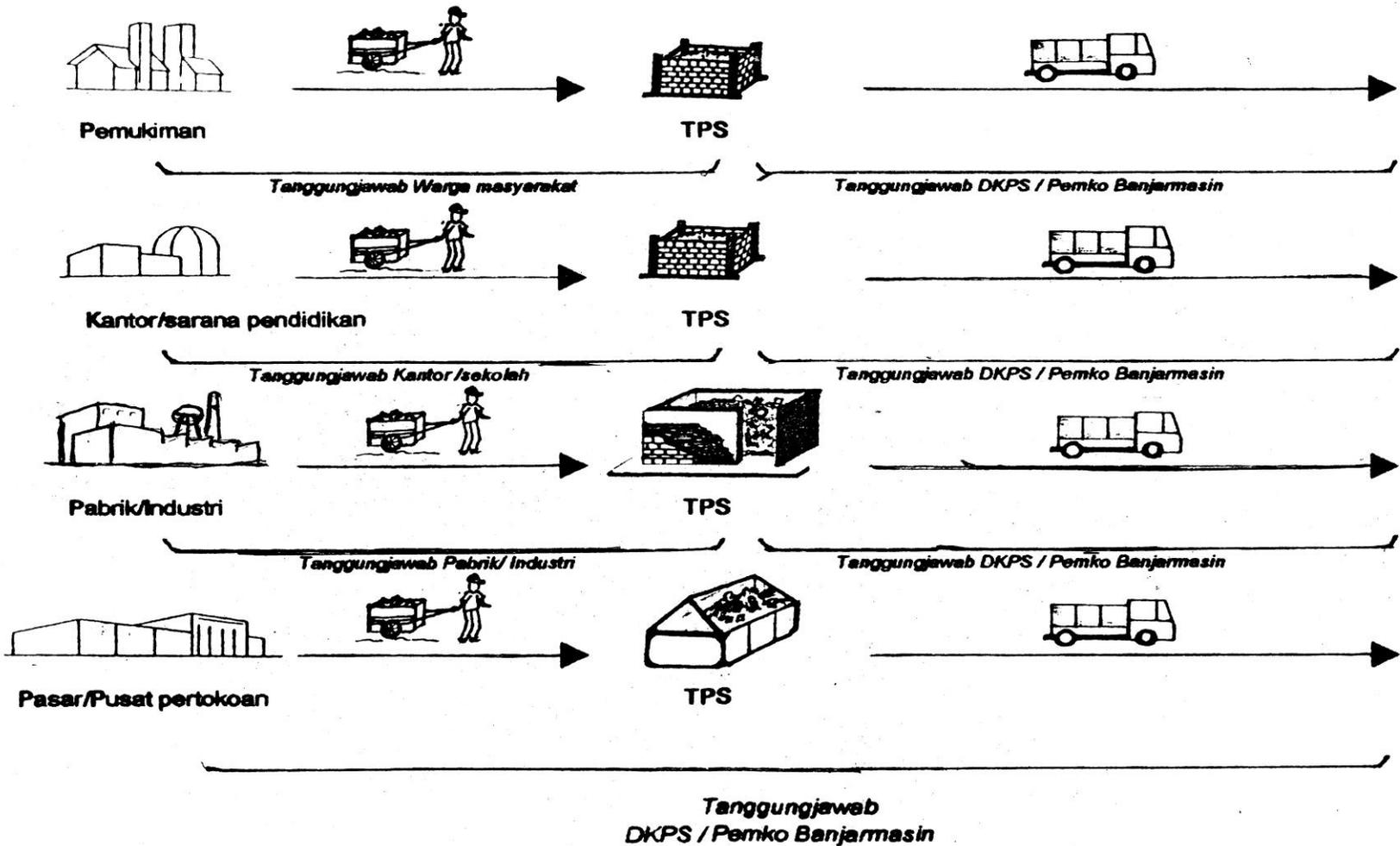
(Data Tahun 2006)

Tabel 3.9.
Kapasitas alat angkut

No.	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas (M3)
1	Dump Truck	24	6
2	Pick Up	2	2
3	Pick Up Container	1	2
4	Arm Roll	6	4
5	Sepeda Motor roda tiga	3	1
6	Gerobak/becak sampah	35	0,5

(Data Tahun 2006)

Gambar 3.9. Sistem Pengangkutan Sampah saat ini
 Dari Pemukiman/Pasar/ Sekolah/Kantor →TPS →TPA



3.2.3. Drainase

Kota Banjarmasin terletak di daerah rendah dan sebagian besar terdiri dari rawa dengan ketinggian sekitar 0.16 m di bawah permukaan air laut. Kondisi seperti ini menyebabkan drainase kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga pada saat pasang fungsinya berubah menjadi kebalikan saluran drainase, yaitu mempercepat terjadinya genangan atau banjir pada suatu daerah. Pengaruh ini akan semakin terasa apabila terjadi pasang disertai hujan, sehingga akumulasi debit air yang seharusnya dialirkan keluar terkumpul di daerah tersebut.

Berdasarkan karakteristik, ukuran dan fungsi sungai di Kota Banjarmasin dapat diklasifikasi sungai-sungai tersebut berdasarkan lebar sungai yaitu :

- Sungai Besar Lebar sungai > 500 m
- Sungai Sedang Lebar sungai 25 - 500 m
- Sungai kecil Lebar sungai 2-25 m

Ditinjau dari fungsinya, sungai-sungai di kota Banjarmasin pada umumnya mempunyai multi fungsi, yaitu berfungsi sebagai drainase, lalu lintas air/sungai, MCK (Mandi Cuci Kakus) dan sarana rekreasi.

Pada beberapa ruas sungai dan anak sungai banyak yang sudah berubah fungsi diakibatkan oleh perkembangan perumahan atau bangunan. Dan beberapa anak sungai juga tidak berfungsi akibat endapan lumpur, sampah dan gulma yang menutup sungai sehingga aliran kurang lancar dan mengakibatkan beberapa daerah tergenang air.

Kondisi existing sistem drainase kota Banjarmasin terbagi dalam Satuan Wilayah Pengendali Genangan atau disebut SWPG. Semua sistem pembuangan air hujan didalam daerah SWPG akan bermuara pada badan air pengendali genangan.

Wilayah pelayanan drainase yang ada di Kota Banjarmasin **dikelompokkan menjadi 26 (SWPG) sebagai berikut (Tabel 3.10).**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. SWPG Sudimampir | 14. SWPG Surgi Mufti |
| 2. SWPG Melayu | 15. SWPG Sei Jingah |
| 3. SWPG Kuripan | 16. SWPG Antasan Besar A |
| 4. SWPG Kelayan | 17. SWPG Antasan Besar B |
| 5. SWPG Pasar lama | 18. SWPG Veteran |
| 6. SWPG Mulawarman | 19. SWPG A. Yani |
| 7. SWPG Pelambuan A | 20. SWPG Perkapuran |
| 8. SWPG Pasir mas | 21. SWPG Pemurus |
| 9. SWPG Belitung Laut | 22. SWPG Tatah Belayung |
| 9.a. SWPG Belitung Darat | 23. SWPG Kelayan Kecil |
| 10. SWPG Kuin | 24. SWPG RK. Ilir |
| 11. SWPG Alalak | 25. SWPG Cempaka |
| 12. SWPG Kayu Tangi | 26. SWPG Trisakti |
| 13. SWPG Antasan | |

Pengaruh pasang surut mengakibatkan tidak jelasnya arah aliran Sungai Barito dan Sungai Martapura serta anak-anak sungainya. Tetapi pada saat surut umumnya arah aliran anak-anak sungai tersebut menuju ke Sungai Barito dan Sungai Martapura.

Saluran drainase sekunder maupun tersier yang ada didaerah permukiman salurannya banyak yang spasial atau tidak menjadi satu ke outlet pembuangan akhir. Saluran yang terputus akan mengakibatkan buangan dari permukiman tidak sampai ke saluran sekunder yang pada akhirnya akan menggenang disekitar daerah tersebut. Kondisi existing dan skema jaringan drainase yang ada dapat dilihat pada Tabel 3.11, terlampir.

3.2.4. Air Limbah

i. On site

Perkiraan kasar sekitar 60% penduduk menggunakan cubluk untuk pengelolaan tinja, sisanya tanpa diolah / sembarang. Sedangkan air cucian (mandi, cuci) saat

ini 99% belum dikelola, ada yang dibuang ke sungai, dan yang lainnya dibuang sembarang (umumnya dibawah kolong rumah), 1% berada pada kawasan pelayanan IPAL (off site)



SANIMAS

Program Sanitasi oleh Masyarakat (*Sanimas*) merupakan Program Sanitasi dari Pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat yang berada di lingkungan pemukiman padat dan kumuh di perkotaan.

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



WC Umum yang biasa digunakan warga; lokasi RT. 33, 65

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



WC Umum yang biasa digunakan warga; lokasi RT. 40

Melalui Program Sanimas ini, masyarakat dapat memilih sendiri program pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman (khususnya pembuangan limbah rumah tangga) yang sesuai, dapat ikut aktif menyusun rencana pelaksanaan, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharannya bahkan bila perlu dapat mengembangkannya.

Tujuan dari Program Sanimas adalah :

1. Memperbaiki kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat
2. Menjadikan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagai salah satu solusi masalah sanitasi kota/kabupaten.

Program Sanimas di Kota Banjarmasin tahun 2006 ada pada empat kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat
2. Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah
3. Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan
4. Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara

Status untuk program Sanimas pada tahun 2006 yaitu 100% sudah selesai, namun belum digunakan karena belum diresmikan oleh Pemerintah Daerah.



MCK Kelurahan Kelayan Tengah

Organisasi Pengelola Sanimas terdiri dari Fasilitator dan KSM. Fasilitator yaitu Konsultan, dimana konsultan juga di tunjuk oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat. Dan untuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat terdiri dari masyarakat daerah program dimana Sanimas dilaksanakan.

Untuk tahun 2006 ini masyarakat yang terlayani \pm 150 KK/Lokasi.

Untuk tahun 2007 sanimas akan dilakukan di 3 lokasi yaitu:

1. Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Kelurahan basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat
3. Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara

Pendanaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Sanimas sebesar **Rp. 860,762,000,00**. dan untuk Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana Rp. 100,000,000,00 per 1 lokasi Sanimas.

Untuk program Sanimas tahun 2007 baru sampai tahap penyusunan RAB, keterlambatan pelaksanaan Sanimas salah satunya karena terlambatnya pencairan dana.

ii. Off site

a. Sistem yang ada

Instalasi Pengolahan Air Limbah menggunakan sistem penguraian biologis tipe fixed film yang menggunakan media plastik berputar yang memanfaatkan mikroorganisme dengan media reaktor RBC (Rotating Biological Contactor)



IPAL KAWASAN LAMBUNG MANGKURAT (TITIK I)

Tahun 1998/1999 : Study Pilot Project IPAL Kota Banjarmasin

(Lambung Mangkurat dan sekitarnya ± 16,5 Ha)

Tahun 1999/2000 : Pembangunan IPAL kapasitas 500 m³/hari dengan 200 SR

Tahun 2001/2002 : Perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan jumlah pelanggan



IPAL LAMBUNG MANGKURAT

Instalasi Pengolahan Air Limbah Lambung mangkurat mulai beroperasi pada tahun 2000 dengan kapasitas pengolahan 500 m³ / hari dan jumlah pelanggan 528 sambungan rumah dan masih dapat dimaksimalkan / dioptimalkan sampai 700 sambungan rumah.

IPAL KAWASAN PEKAPURAN RAYA (TITIK II)

- Tahun 2003 : Out line plan dan study pengembangan sistem air limbah terpusat kawasan Pekapuran Raya dan sekitarnya
- Tahun 2004 : Pembangunan IPAL Pekapuran Raya Tahap I kapasitas 500 m³/hari
- Tahun 2005 : Perluasan jaringan Kawasan Pekapuran Raya dan penyambungan 34 Sambungan Rumah



IPAL PEKAPURAN RAYA

Instalasi Pengolahan Air Limbah Pekapuran Raya mulai beroperasi pada tahun 2006 dengan kapasitas pengolahan 500 m³ / hari dan jumlah pelanggan 34 sambungan rumah dan masih dalam tahap pengerjaan sebanyak 500 sambungan rumah.

IPAL III (HKSAN / HASAN BASRI)

Instalasi Pengolahan Air Limbah HKSAN / HASAN BASRI berkapasitas 100 m³ / hari, tetapi Instalasi ini masih belum beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan sarana penunjang.



Pembangunan RSPS

b. Sistem Pengumpulan dan Pengolahan

Limbah yang diolah adalah limbah domestik (black water dan grey water), dengan sistem pengolahan terpusat (off site system).

Semua air limbah yang bersumber dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti wastafel, tempat cuci, kamar mandi, dapur, WC dan sebagainya (kecuali air hujan) dialirkan melalui pipa secara grafitasi menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

c. Jumlah Pelanggan

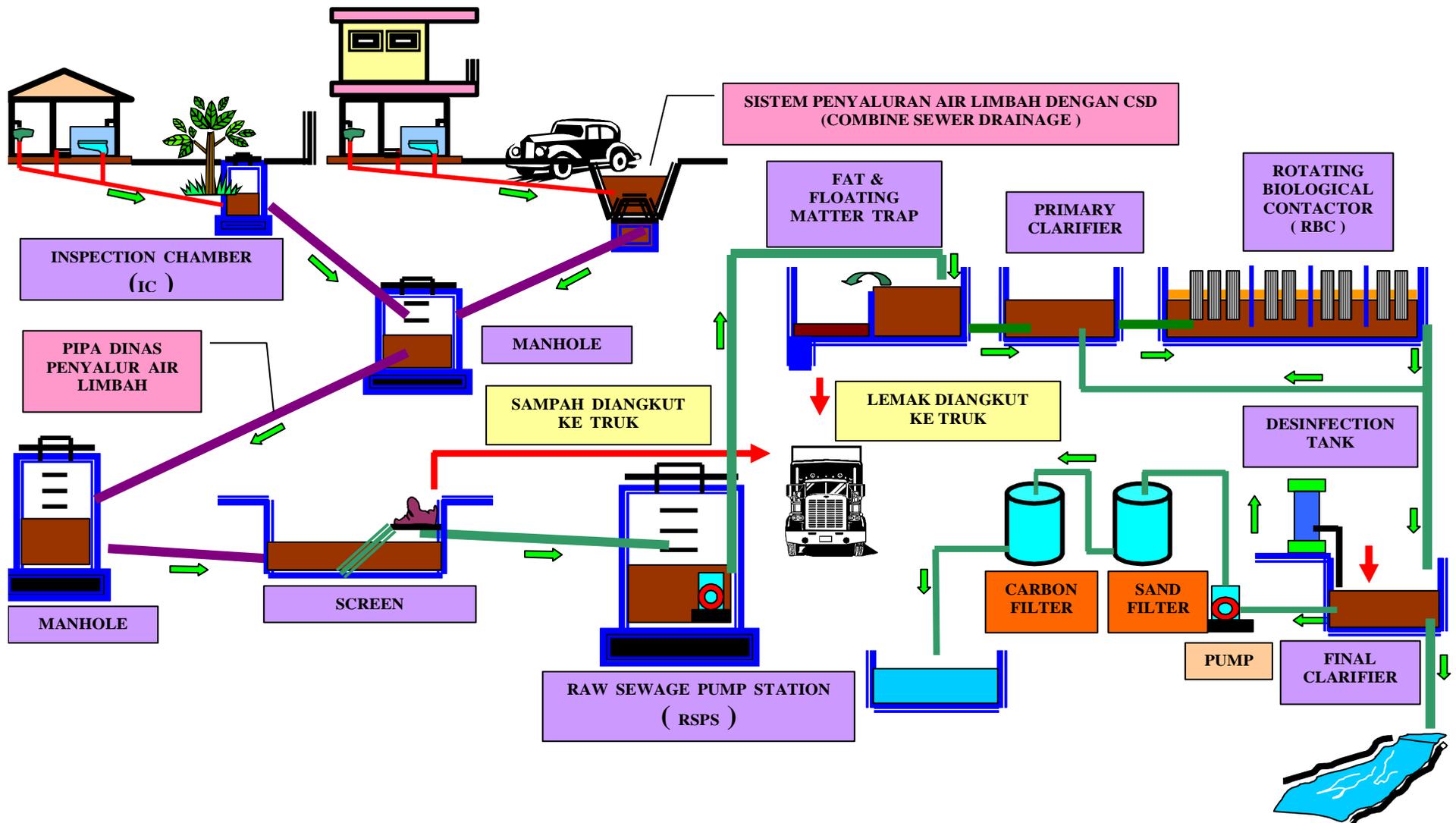
Jumlah pelanggan aktif pada tahun 2006 sebesar 562 dengan Komposisi pelanggan sebagai berikut :

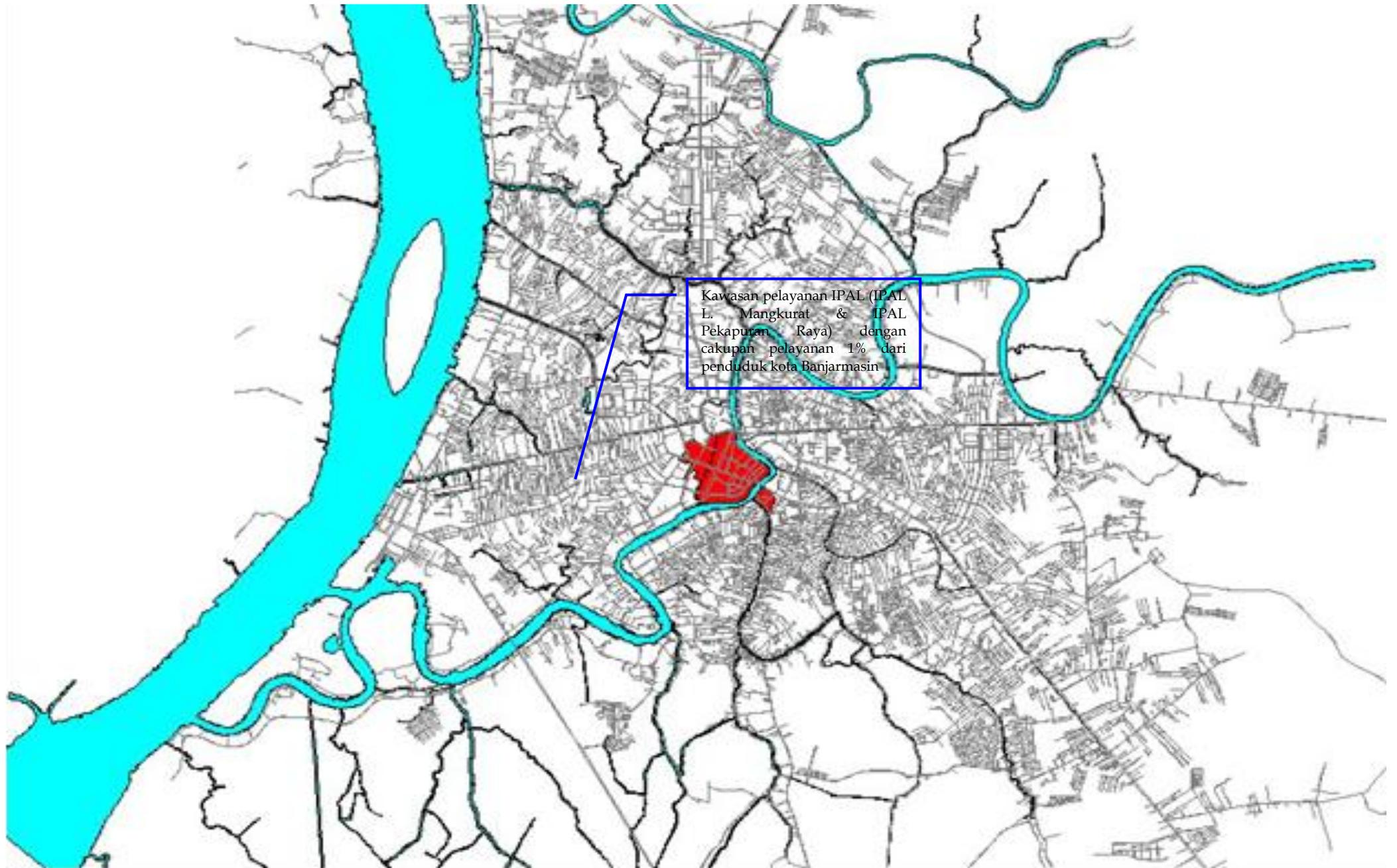
Tabel 3.11. Pelanggan PD PAL

No.	Golongan Pelanggan	Jumlah	%
1	Sosial	12	2
2	Non Niaga	144	21
3	Niaga & Industri	406	77
	Total	562	100

Data terakhir November 2006

Gambar 3.11. Skema proses pengolahan air limbah Kota Banjarmasin





Peta 3.12. Daerah Pelayanan PD PAL Kota Banjarmasin

d. Biaya Penyambungan dan Tarif Jasa Pelayanan Air Limbah

Sistem tarif pelayanan IPAL telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Banjarmasin. Bagi pelanggan IPAL yang juga berlangganan PDAM, struktur biaya pelayanan pembuangan dan pengolahan air limbah, dihitung berdasarkan besarnya tarif golongan dan banyaknya pemakaian air bersih PDAM yang besarnya 25% dari rekening PDAM. Sedangkan untuk yang tidak berlangganan PDAM besar tarif diatur sebagai berikut :

Tabel 3.12. Tarif Jasa Pelayanan

No.	Pelanggan	Tarif (Rp./bulan)	No.	Pelanggan	Tarif (Rp./bulan)
A.	Kegiatan Sosial		D.	Industri	
	1. Sosial Umum	5.000		1. Industri Rumah Tangga	20.000
B.	Non Niaga		2. Industri Menengah	50.000	
	1. Rumah Tangga A1	5.000	3. Industri Besar / Khusus	100.000	
	2. Rumah Tangga A2	10.000	E.	Jenis Usaha di Areal Pasar	
	3. Rumah Tangga A3	25.000		1. Pedagang Emper	5.000
4. Rumah Tangga B	25.000	2. Pedagang Meja		5.000	
C.	Kegiatan Niaga			3. Pedagang Kios	10.000
	1. Niaga Kecil	5.000		4. Pedagang Toko	15.000
	- Niaga Kecil I	20.000	5. Pedagang Grosir	20.000	
	- Niaga Kecil II	30.000			
	- Niaga Kecil III				
	2. Niaga Menengah	50.000			
	3. Niaga Besar	100.000			

Tabel klasifikasi tarif retibusi air limbah (PERDA no. 16 th 2006)

iii. Campuran

Dimaksud dengan sistem tercampur adalah tergabungnya saluran air limbah domestik (tinja & air bekas cuci) dan air hujan. Sistemnya sebagian menggunakan saluran drainase dan dikombinasikan dengan jaringan perpipaan. Akibatnya pada waktu musim hujan, sebagian air hujan akan masuk ke jaringan perpipaan bercampur dengan air limbah domestik. Tetapi hal tersebut dianggap masih menguntungkan, karena air hujan tersebut bermanfaat untuk menggelontor jaringan perpipaan, asal hujannya tidak terlalu besar.

c. Permasalahan utama yang dihadapi, status & upaya penyelesaian yang telah dilakukan, inisiatif baru penyelesaian masalah yang ada

(1) Air Bersih

Sejak tahun 1995 sistem pendistribusi PDAM Kota Banjarmasin dipisahkan menjadi 2 wilayah, yaitu IPA A. Yani 526 lt/dt melayani wilayah Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara, sedangkan IPA Pramuka 500 lt/dt dan MTP Sungai Lulut 25 lt/dt melayani pelanggan di wilayah Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar.

Permasalahan yang masih dihadapi PDAM Kota Banjarmasin hingga saat ini adalah Pasokan air baku, Kapasitas produksi dan kehandalan sistem, Tingkat kehilangan air serta Pelayanan pelanggan.

a) *Pasokan Air Baku.*

Kendala pertama adalah penurunan kapasitas air baku dari Intake Pematang Panjang yang bersumber dari saluran irigasi Riam Kanan. Berdasarkan nota kesepakatan/ MOU tanggal 1 Mei 1991 antara Dirjen Pengairan dengan Dirjen Cipta Karya besarnya kapasitas yang dijanjikan sebesar 1.100 lt/dt, namun perkembangan yang terjadi saat ini kenyataan yang didapat hanya mampu mensuplai 600 lt/dt, bahkan saat musim kemarau mencapai 100 lt/dt, padahal kebutuhan rata-rata pasokan air baku PDAM Banjarmasin Kota Banjarmasin sebesar 800 lt/dt.



*Kondisi Awal
Irigasi Riam Kanan*



*Kondisi Saat ini
Irigasi Riam Kanan*

Kendala kedua adalah keterbatasan kapasitas pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Kapasitas terpasang saat ini sebesar 600 lt/dt, padahal sumber air baku Sungai Tabuk yang memiliki kehandalan pada musim kemarau masih mampu dimanfaatkan hingga kapasitas 1.875 lt/dt.

Kendala ketiga adalah kontinuitas suplai air baku dari intake Sungai Bilu dalam mensuplai IPA A.Yani, terutama saat musim kemarau terpaksa harus berhenti beroperasi karena air sungai Martapura sudah terintrusi oleh air laut (asin). Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan produksi dan kesinambungan distribusi air bersih ke pelanggan.

Beberapa faktor penyebab masalah pasokan air baku adalah :

1. Pada *intake Pematang Panjang*, adanya kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam mengembangkan daerah wisata dan usaha di sepanjang tepi saluran menimbulkan maraknya pengguna lain memanfaatkan air saluran seperti ; tambak ikan serta tempat wisata semakin tidak terkendali. Disamping itu sistem pemeliharaan (pembersihan/ pengeringan) dasar saluran yang belum berjalan secara periodik, baik untuk perbaikan saluran maupun pembersihan terhadap tumbuhan-tumbuhan seperti gulma, ganggang dan lain-lain.
2. Pada *intake Sungai Tabuk*, disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penambah kapasitas pasokan air baku, seperti : jumlah pompa yang tersedia, peralatan pendukung serta jaringan pipa transmisi air baku.

3. Pada *intake Sungai Bilu*, disebabkan oleh tingginya kadar garam yang masuk ke Sungai Martapura (intrusi air asin) terutama pada saat musim kemarau sehingga air tidak dapat diolah.

b) Kapasitas Produksi dan Keandalan Sistem.

Kapasitas produksi dan keandalan sistem yang perlu ditingkatkan, seperti ; Penambahan kapasitas produksi IPA, Sistem perpompaan, Jaringan distribusi, reservoir dan PLN. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kota, penambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah pelanggan. Sebagai contoh, keterlambatan penambahan jumlah pelanggan serta pendistribusian yang belum merata akibat : kapasitas produksi yang ada sudah tidak mampu menambah jumlah pelanggan, sarana pendukung sistem produksi dan distribusi serta peremajaan jaringan pipa eksisting (pipa lama/ rusak dan kropos) yang belum dilakukan secara menyeluruh.

c) Tingkat Kehilangan Air.

Kehilangan air yang terjadi pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin masih cukup tinggi, yaitu 28,56%, hal tersebut dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis umumnya terjadi pada sistem jaringan perpipaan, sedangkan non teknis disebabkan oleh sistem meter pelanggan, seperti pembacaan meter, kondisi meter pelanggan dan pembayaran rekening pelanggan.

d) Pelayanan Pelanggan.

Permasalahan pelayanan pelanggan antara lain : sistem pusat informasi dan responsivitas PDAM terhadap komplain, meliputi ; informasi kebocoran pipa, meter rusak/ tidak terbaca, klasifikasi tarif, sambungan baru serta sistem pembayaran yang belum menjangkau ke seluruh wilayah daerah pelayanan

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, upaya-upaya yang telah dilakukan PDAM Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah:

a) Penanganan Pasokan Air Baku

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pengairan terhadap konsistensi penjatahan debit aliran air ke PDAM,

pengoperasian intake Sungai Tabuk secara kontinu serta pembersihan saluran irigasi Riam Kanan dari tumbuhan gulma sepanjang 30 km.



Pembersihan Gulma di Saluran Irigasi



Pengaturan Debit Saluran Irigasi

2. Peningkatan kapasitas pasokan air baku intake Sungai Tabuk 600 lt/dt menjadi 900 lt/dt melalui : rehabilitasi bangunan intake, penambahan sistem perpompaan serta pemasangan pipa transmisi air baku \varnothing 1.000 mm, 800 mm dan 630 mm dari intake Sungai Tabuk, intake pilot scheme, waduk *pilot scheme* sampai dengan intake Pematang Panjang.



Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku \varnothing 1.000 mm, Pipa \varnothing 800 mm dan \varnothing 630 mm

b) Kapasitas Produksi dan Keandalan Sistem

1. Melakukan optimalisasi terhadap sistem pengolahan, seperti ; optimalisasi kapasitas produksi sistem pengolahan air, perbaikan dan penggantian sistem perpompaan, mekanikal elektrik, pengurusan, pembersihan serta penambahan bangunan-bangunan pendukung.



Pulsator IPA A. Yani



Elektrikal IPA Pramuka



Sistem Perpompa IPA

2. Perbaikan/penambahan sarana pendukung sistem produksi meliputi : penambahan reservoir, pembangkit listrik, peralatan perpompaan, peralatan bahan kimia, hidrofor serta penambahan daya PLN. Disamping itu perbaikan/ penambahan terhadap sistem jaringan distribusi seperti : pemasangan pipa, penambahan assesoris pipa, pengembangan jaringan, jembatan pipa, pembuatan pagar pengaman pipa dan lain-lain.



Genset Intake Sungai Tabuk

Jembatan Pipa Ø630-400 mm

Hidrofor

3. Mulai awal tahun tahun 2005 dilakukan pembangunan IPA kap 500 l/dt di Jl. Pramuka untuk menambah kapasitas yang sudah ada. Pembangunan ini dilakukan dengan sistem BTO (Build Transfer Operate), yaitu bekerjasama dengan Pemerintah dan Swasta (PT. Adhi Karya Tbk.) dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan September 2006.



c) Penurunan Kehilangan Air

1. Pembenahan sistem jaringan distribusi dengan menggunakan sistem blok beserta pendataan pelanggan pada seluruh daerah layanan yang diadopsi kedalam program *Geografic Information System (GIS)*.
2. Perbaikan/penggatian meter induk dan pelanggan serta monitoring pemakaian air pelanggan serta pembaca meter.



Pemasangan Pipa Distribusi Ø150 mm



Pekerjaan Perbaikan Pipa Bocor

d) Pelayanan Pelanggan.



1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) pada sistem pembayaran rekening, loket informasi dan loket pengaduan baik di kantor pusat maupun pada kantor-kantor bantu yang tersebar di wilayah kota Banjarmasin.
2. Pelayanan informasi pelanggan melalui Sistem informasi rekening pelanggan (*Billing System*) melalui telepon bebas pulsa 109 sebelum melakukan transaksi, SMS-3954 serta penanganan komplain pelanggan secara *on line*.

Pembacaan Meter Pelanggan dengan sistem Barcode yang dibaca menggunakan PDA (Personal Data Assistance). Hasil yang didapat lebih akurat dan efisien karena dapat langsung diupload ke SIMPADU

(2) Persampahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan sampah saat ini :

- 1) Kondisi Sampah Yang Terus Meningkat dan kurangnya alat angkut persampahan
- 2) Kesadaran Masyarakat Yang Masih Kurang Untuk Membuang Sampah ke TPS Pada Waktu Yang Ditentukan
- 3) Permasalahan TPS Yang Kurang Sesuai Dari Segi Estetika karena umumnya berada di pinggir jalan Protokol dan jauh dari pemukiman
- 4) Permasalahan di TPA Basirih
 - a. Peralatan penunjang pengelolaan sampah di TPA masih kurang

- b. Jalan Masuk dan Jalan ke TPA Masih Rusak Berat
- c. Timbangan Tidak Dapat di Fungsikan Karena Rusak
- d. Instalasi Pengolahan Limbah (IPLTL) masih perlu pembenahan

Dengan adanya permasalahan diatas maka alternatif penyelesaian yang akan dilakukan adalah :

- Menyadarkan masyarakat agar tidak menghasilkan sampah yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis atau pengolahan sampah dengan cara 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle)
- Mengadakan sosialisasi PERDA No 4 Thn 2000 ttg perubahan atas PERDA No 2 Thn 1993 ttg Penyelenggaraan Kebersihan serta sanksi Hukum denda maksimal Rp. 1 juta atau kurungan 3 bulan
- Mencari lokasi TPS sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama warga lingkungan tersebut serta mengupayakan adanya lokasi Transfer Depo di tiap Kecamatan yang berfungsi sebagai pengolahan sampah di tiap Kecamatan
- Untuk TPA Basirih :
 - a. Armada/angkutan truk agar di tambah serta truk yang sudah tua di atas 10 tahun agar diganti dan penambahan alat berat (Bulldozer dan Loader)
 - b. Sarana jalan masuk ke Zone pembuangan sampah perlu pengerasan dan pengaspalan agar pada saat musim hujan truk tidak amblas dan membuang sampah di luar Zone yang ditentukan
 - c. Timbangan truk muatan sampah agar segera diperbaiki melalui ABT
 - d. Instalasi pengolahan limbah (IPLTL) akan terus dikembangkan sehingga limbahnya merupakan hasil limbah berupa pupuk cair maupun pupuk kering dapat dimanfaatkan/dijual kepada masyarakat

(3) Drainase

Secara umum permasalahan drainase Kota Banjarmasin dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Dimensi saluran yang ada sebagian besar tidak memenuhi syarat teknis drainase.
- Terdapatnya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan secara cepat dari saluran sekunder dan tersier.

- Inlet dari jalan kesaluran tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Banyak tumbuhan air yang tumbuh disaluran sehingga menghambat pengaliran.
- Pengaruh pasang surut air laut yang mempersulit pengaliran air dan saluran ke outlet sungai.
- Pembuangan sampah ke saluran drainase sehingga menutup saluran drainase dan menghambat aliran.
- Penyempitan alur sungai dan anak sungai sehingga kapasitas tampung tidak mencukupi lagi.

(4) Air Limbah

Permasalahan utama :

1. Perilaku masyarakat

- Kebiasaan bermukim dibantaran sungai merupakan perilaku yang sulit diubah, karena merupakan kebiasaan sejak berpuh bahkan mungkin beratus tahun secara turun temurun.
- Adanya pemahaman yang keliru pada penanganan limbah cair, dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga pengelolaan air limbah terkesan seadanya / sembarang. Banyak air buangan yang disalurkan langsung ke saluran drainase atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Dan masyarakat menganggap hal tersebut biasa saja, tidak bermasalah dan gampang.
- Percontohan telah sering dilakukan akan tetapi hasilnya tidak atau bahkan hampir tidak ada hasilnya. Kemungkinan karena kurangnya monitoring atau metode yang digunakan tidak sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Banjarmasin.

2. Keadaan alam

- Kondisi tanah dengan permukaan air tanah yang tinggi, sehingga memerlukan teknologi khusus untuk pengolahan air limbah. Tangki septik pada umumnya memerlukan lahan kering untuk peresapan air, sedangkan dikota Banjarmasin hampir tidak ada lahan kering (selain hasil urugan). Sehingga penggunaan tangki septik tidak bisa direkomendasikan, terlebih lagi untuk penggunaan cubluk.
- Banyak sungai / anak sungai yang dipengaruhi pasang surut yang secara rutin merendam kawasan kota, khususnya di sekitar daerah aliran sungai. Jika pada satu kawasan terjadi kelalaian penanganan

limbah cair akibatnya akan cepat menyebar ke daerah sekitarnya melalui arus air pasang surut. Oleh karena itu pengelolaan limbah cair di Banjarmasin harus menyeluruh, agar hasil yang diharapkan bisa dilihat dengan nyata. Percuma saja jika pada suatu wilayah bisa menangani limbah cairnya, tetapi daerah sekitarnya tidak dikelola dengan baik.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, upaya-upaya kedepan yang akan dilakukan PDPAL terkait dengan program pemberdayaan diantaranya:

- Melakukan perubahan paradigma melalui pemberdayaan dengan melibatkan guru dan alim ulama, dan pembelajaran secara konsisten tentang PHBS
- Memulai pendidikan pola hidup bersih sehat sejak dini terhadap anak Sekolah Dasar
- Membentuk kelompok keluarga sehat. Pembentukan kelompok keluarga sehat atau dasa wisma (setiap sepuluh keluarga)
- Mengembangkan sistem penanganan sanitasi terpadu skala pilot untuk memotifasi wilayah sekitarnya
- Membangun sistem percontohan yang standar dengan teknologi sederhana dan ekonomis seperti MCK umum plus, dan model tangki septik yang benar sesuai dengan kondisi geografis kota Banjarmasin.
- Mempertegas / menerapkan sanksi terhadap pelanggar peraturan (perlu adanya peraturan yang mendukung)

(2) Persampahan

Pengelolaan sampah idealnya dilakukan dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) :

1. Reuse artinya pemanfaatan kembali sampah dengan memisahkan sampah-sampah yang dapat dimanfaatkan kembali atau dijual sehingga sampah tersebut memiliki nilai ekonomis .
2. Reduce artinya Pengurangan sampah dalam arti menyadarkan warga agar tidak menghasilkan sampah yang berlebihan dalam kehidupannya sehari-hari
3. Recycle artinya daur ulang sampah yaitu sampah-sampah yang olah /diproses menjadi bahan baku produk lanjutan sehingga dapat memiliki nilai ekonomis.

(3) Drainase

Pengembangan & Penataan Drainase

1. Program Pemb. Saluran Drainase / Gorong-gorong
 - Pembangunan saluran drainase sesuai dengan perkembangan kota terutama meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap perkembangan perumahan dan permukiman.
 - Program ini dikembangkan dengan sistem Satuan Wilayah Pengendali Genangan (SWPG) dan Kode Saluran (ada 26 SWPG)



2. Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan bangunan air / drainase, Pemeliharaan saluran drainase yang masih sangat bergantung kepada peran Pemerintah yang mana seyogyannya melibatkan peran serta masyarakat.

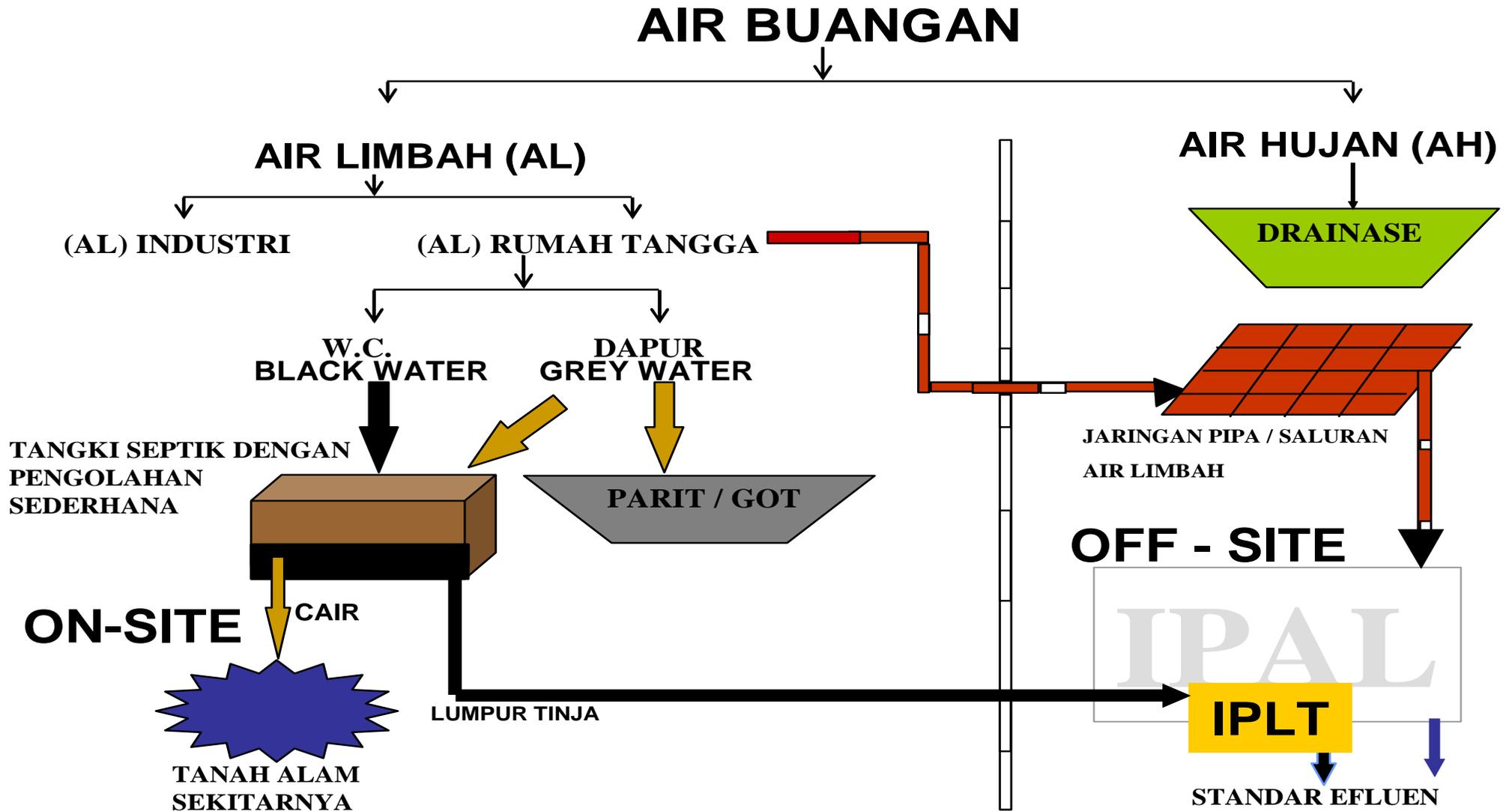
- Normalisasi Sungai yaitu merehabilitasi fungsi sungai sebagai bagian dari sistem drainase primer kota.



(4) Air Limbah

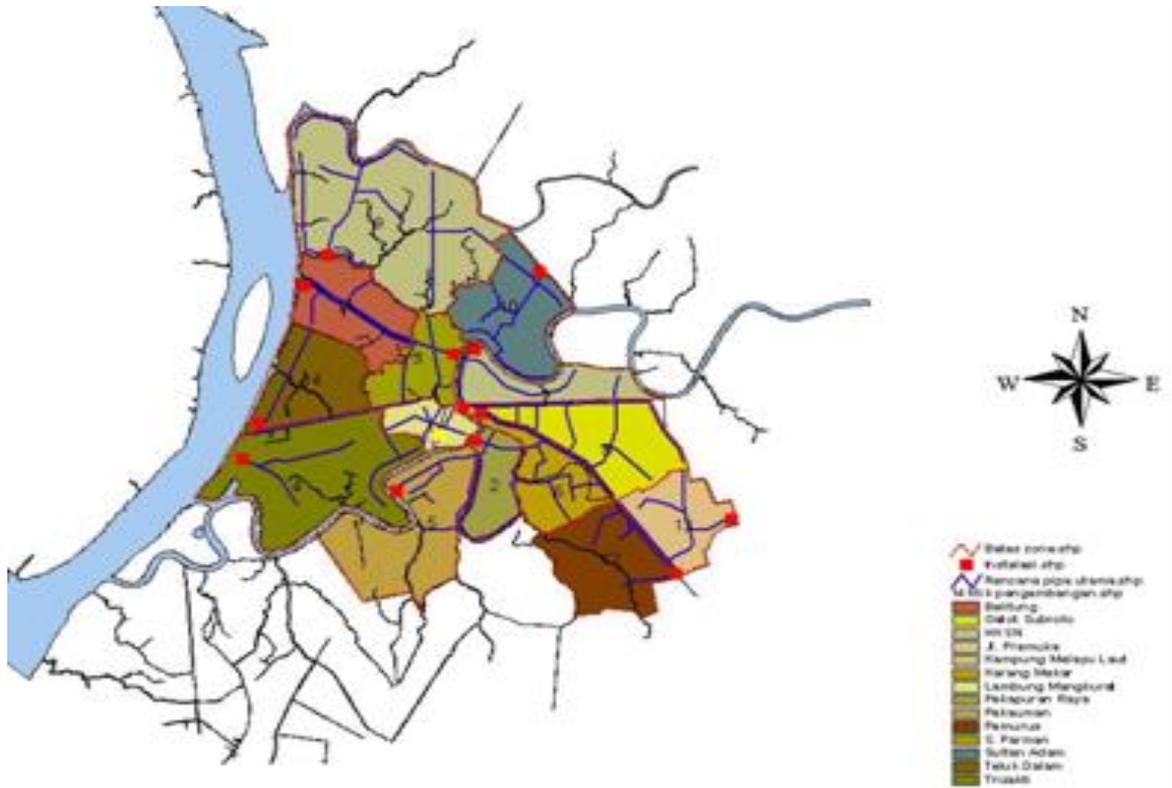
Di Banjarmasin idealnya pengolahan air limbah harus dilakukan dengan system terpusat. Karena mengingat lahan yang sudah terbatas, dan keadaan air muka tanah tinggi, serta dipengaruhi oleh air pasang surut. Tetapi untuk itu memerlukan biaya besar dan waktu yang lama, maka untuk sementara dikembangkan pengolahan setempat yang direkomendasikan (buangannya memenuhi standar baku air buangan). Yaitu dengan system pengolahan sederhana pada kelompok-kelompok kecil masyarakat (sistem on site). Walaupun istilah nya on site akan tetapi sebenarnya menggunakan juga sistem pengolahan terpusat hanya saja untuk skala kecil (RT/RW). Yang nantinya sistem on site tersebut akan dikoneksi/disambungkan pada jaringan pipa air limbah terpusat. Untuk daerah-daerah yang berada pada jalan besar diarahkan menggunakan sistem perpipaan air kotor kota. Sedangkan yang terletak didaerah yang jauh dari jalan besar atau tidak mungkin dilayani dengan sistem perpipaan terpusat akan dilayani dengan sistem on site.

Gambar 3.14. Skematik Rencana Penanganan Air Limbah



Seluruh air buangan rumah tangga diharapkan dialirkan melalui sistem perpipaan, dan drainase khusus untuk menampung air hujan.

**14 TITIK PENGEMBANGAN
SISTEM PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT**



Peta 3.15. Peta 14 titik rencana pengembangan daerah pelayanan IPAL Kota Banjarmasin

1. Titik I Kawasan Jl. Lambung Mangkurat (Operasional) : 20 Ha
2. Titik II Kawasan Jl. Pekapuran Raya (Tahap Pembangunan) : 50 Ha
3. Titik III Kawasan Jl. S. Parman (Tahap Rencana)
4. Titik IV Kawasan Kawasan Trisakti (Tahap Rencana)
5. Titik V Kawasan Pekauman Dan Sekitarnya (Tahap Rencana)
6. Titik VI Kawasan Karang Mekar dan sekitarnya (Tahap Rencana)
7. Titik VII Kawasan Kampung Melayu Laut dan sekitarnya (Tahap Rencana)
8. Titik VIII Kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya (Tahap Rencana)
9. Titik IX Kawasan JL. Hasan Basri/HKSN sekitarnya (tahap pembangunan)
10. Titik X Kawasan Sultan Adam dan sekitarnya (Tahap Rencana)
11. Titik XI Kawasan Belitong dan sekitarnya (Tahap Rencana)
12. Titik XII Kawasan Pemurus dan sekitarnya (Tahap Rencana)
13. Titik VIII Kawasan Jl. Pramuka dan sekitarnya (Tahap Rencana)
14. Titik VIII Kawasan Teluk Dalam sekitarnya (Tahap Rencana)

Tabel 3.13.
PENTAHAPAN PELAYANAN AIR LIMBAH

Tahapan	Zone	Nama Zone	Jlh pddk per zone	Status Saat ini (2006)				Rencana (2007-2015)				
				Capacity(m ³ /hr)	SR	Beneficieris	% Kawasan	Capacity (m ³ /hr)	SR	Beneficieris	% Kawasan	% Kota
1	1	Lambung Mangkurat	9,687	500	527	2635	27.20%	1000	1500	7,500	77.42%	1.45%
1	2	Pekapuran Raya	41,301	500	36	180	0.44%	4500	6750	33,750	81.72%	6.53%
1	6	Karang Mekar Dan Sekitarnya	35,268			0	0.00%	4000	6000	30,000	85.06%	5.81%
2	3	S. Parman	30,707			0	0.00%	2000	3000	15,000	48.85%	2.90%
2	7	Kampung Melayu Laut Dan sekitarnya	39,736			0	0.00%	4000	6000	30,000	75.50%	5.81%
2	8	Gatot Subroto Dan Sekitarnya	41,954			0	0.00%	5000	7500	37,500	89.38%	7.26%
2	9	Hasan Basri Dan HKSN	56,633	100	0	0	0.00%	6000	9000	45,000	79.46%	8.71%
3	4	Trisakti	68,234			0	0.00%	6000	9000	45,000	65.95%	8.71%
3	10	Sultan Adam	25,241			0	0.00%	3000	4500	22,500	89.14%	4.35%
3	11	Belitung Dan Sekitarnya	38,729			0	0.00%	4000	6000	30,000	77.46%	5.81%
3	13	Jl. Pramuka	10,592			0	0.00%	1000	1500	7,500	70.81%	1.45%
3	14	Teluk Dalam	54,516			0	0.00%	5000	7500	37,500	68.79%	7.26%
4	5	Pekauman Dan Sekitarnya	43,211			0	0.00%	5000	7500	37,500	86.78%	7.26%
4	12	Pemurus	20,863			0	0.00%	2000	3000	15,000	71.90%	2.90%
		Jumlah kota	516,675		563	2,815	1.97%		78,750	393,750		76.21%

Keterangan:

Dengan pengembangan 14 titik pelayanan maka 76% penduduk kota akan terlayani, sedangkan sisanya 24% akan dilayani dengan pengolahan setempat seperti sanimas (Data ini masih akan disesuaikan)



Bab - 4

PROFIL KESEHATAN PENDUDUK

4.1. Profil Kesehatan Penduduk

Masalah kesehatan utama bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dikota Banjarmasin masih akan didominasi antara lain masih tingginya kejadian *re-emerging diseases* seperti demam berdarah dengue, diare dan tuberculosis. Serta mulai meningkatnya penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus yang perlu mendapat perhatian khusus. Keadaan ini disebabkan oleh multi faktor antara lain :

- a. Adanya perubahan iklim dan letak Indonesia didaerah tropis yang turut mendukung timbulnya masalah tersebut khususnya penyakit menular.
- b. Adanya perubahan demografi baik jumlah, struktur dan distribusinya
- c. Masih tingginya pengaruh perilaku hidup yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan serta masih rendahnya kualitas lingkungan yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit.

(1) Derajat Kesehatan

a. Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi pada tahun 2003 sebanyak 12 orang terjadi peningkatan ditahun 2004 18 orang dan tahun 2005 23 orang. Jumlah kematian bayi belum dapat disebut angka kematian bayi karena harus dilakukan dengan survei yang biasanya dilakukan dengan skala nasional.

b. Kelahiran Hidup

Jumlah kelahiran hidup dikota Banjarmasin pada tahun 2003 sebanyak 11.054 orang, meningkat pada tahun 2004 menjadi 17.176 orang dan menurun pada tahun 2005 menjadi 10.944 orang.

c. Kematian Balita

Pada tahun 2005 tidak ada kematian balita.

d. Kematian Ibu Maternal

Jumlah kematian maternal tahun 2003 dan 2004 yaitu 9 orang, pada tahun 2005 menurun menjadi 5 orang.

e. Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil pada tahun 2003 = 12.899 orang, tahun 2004 = 13.682 orang, dan pada tahun 2005 = 13.892 orang.

(2) Jumlah Kasus Penyakit-Penyakit Menonjol Yang Berhubungan Dengan Lingkungan

a. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)

Kasus penyakit ISPA (pneumonia) tiga tahun terakhir meningkat terus (tahun 2003 sebanyak 5331 kasus, tahun 2004 sebanyak 6224 kasus dan tahun 2005 sebanyak 7106 kasus).

b. DBD (Demam Berdarah Dengue)

Kasus penyakit demam berdarah dengue tahun 2003 sebanyak 63 kasus, tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 118 kasus dan tahun 2005 menurun menjadi sebanyak 63 kasus.

c. Diare

Kasus penyakit diare meningkat tiga tahun terakhir (tahun 2003 sebanyak 8.427 kasus, tahun 2004 sebanyak 9.212 dan tahun 2005 menjadi sebanyak 11568 kasus).

Kasus penyakit yang menonjol kejadiannya, berdasarkan akibatnya adalah :

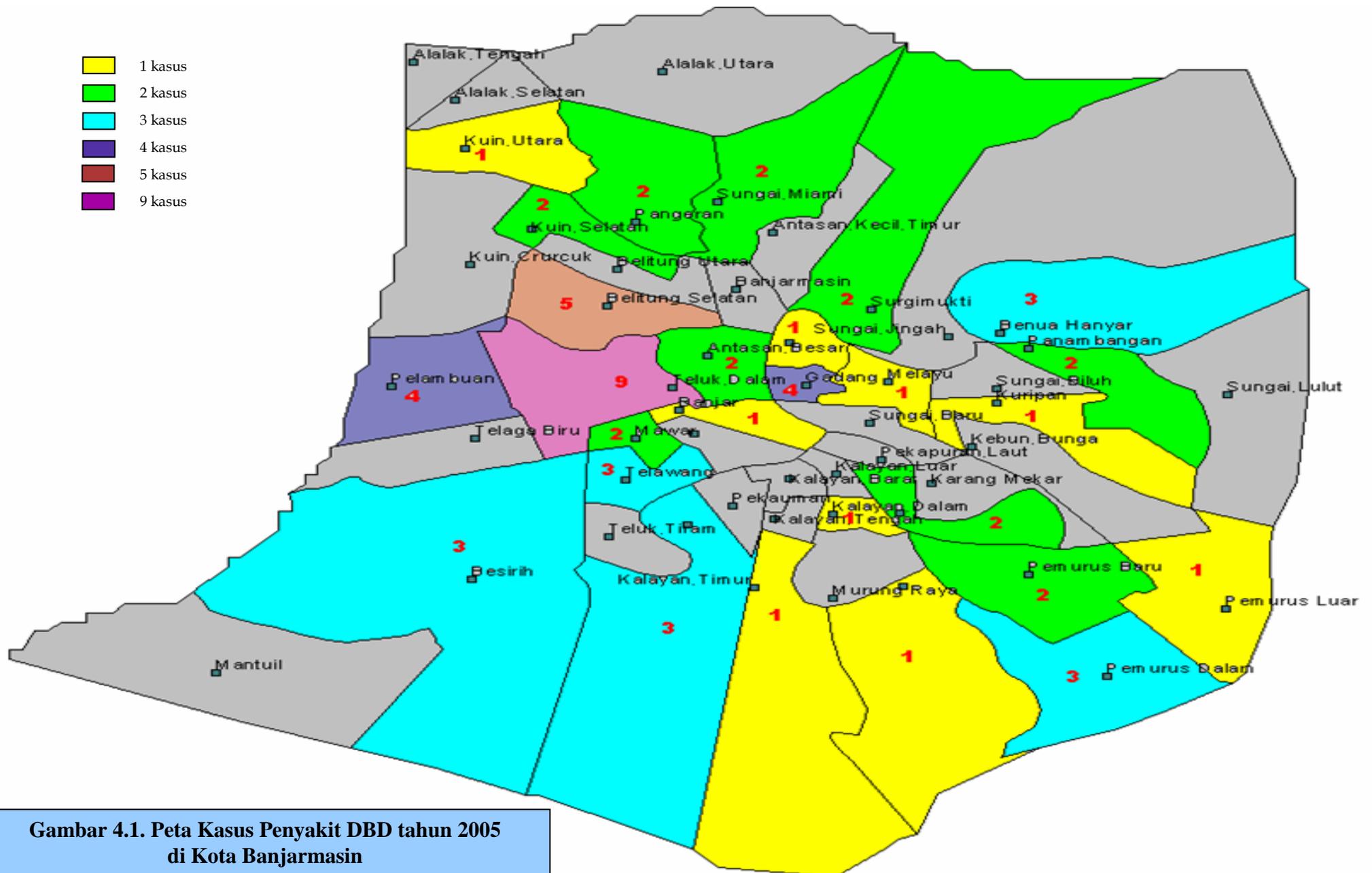
1. Penyakit menular (ISPA, Demam berdarahdengue, TB paru, Diare)
2. Penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes mellitus, Gigi, Kulit)
3. Penyakit berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Diare)

Angka penyakit berbasis lingkungan di Banjarmasin dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Kasus Penyakit Lingkungan yang menonjol

NO	PENYAKIT	2003	2004	2005
1	ISPA (PNEUMONIA)	5331	6224	7106
2	DIARE	7444	9222	11568
3	DBD	64 (3)*	118 (1)*	64 (2)*

Keterangan :)* penderita yang meninggal dunia



Gambar 4.1. Peta Kasus Penyakit DBD tahun 2005 di Kota Banjarmasin

Status Gizi Balita

Status gizi balita pada tahun 2005 di kota Banjarmasin : gizi buruk 4%, gizi kurang 14.7%, gizi baik 78.1% dan gizi lebih 3.3%. Balita Bawah Garis Merah 1.2%. Balita yang mempunyai berat badan Bawah Garis Merah (BGM) menunjukkan perbaikan gizi masyarakat masih diperlukan

(3) Lingkungan Sehat

Program penyehatan lingkungan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat fisik, mental, sosial dan spiritual.

Sesuai kondisinya kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dan sumber air untuk keperluan MCK (mandi cuci dan kakus), perilaku memanfaatkan air sungai sebagai sumber untuk MCK inilah yang menyebabkan rawannya terjadi *water borne disease* seperti penyakit saluran pencernaan (seperti diare) dan penyakit kulit yang masuk 10 penyakit terbanyak di kota Banjarmasin dari tahun ke tahun.

a. Rumah Sehat

Jumlah rumah sehat di kota Banjarmasin dari rumah yang diperiksa tahun 2003 sebesar 66.3% kemudian terjadi penurunan pada tahun 2004 menjadi sebesar 45.1% dan pada tahun 2005 menjadi sebesar 35.2%. Masih rendahnya jumlah rumah sehat disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat, keterbatasan ekonomi, semakin banyaknya penduduk di kota Banjarmasin utamanya para pencari kerja sehingga semakin banyak rumah-rumah sewa yang tidak jarang dibangun tidak sesuai dengan kriteria rumah sehat.

b. Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat

Pemeriksaan TTU menggunakan beberapa indikator yang sederhana dengan kelengkapan fasilitas sanitasi, sehingga didapat jumlah TTU sehat tinggi, Untuk pemeriksaan restoran dan hotel menggunakan format baku sehingga hasilnya benar-benar sesuai standar. TTU sehat tahun 2005 sebesar 77%.

c. Rumah/ Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes

Tahun 2004 pencapaian rumah dan bangunan bebas jentik nyamuk aedes 72.62% dan menurun pada tahun 2005 menjadi sebesar 62.66%. Pencapaian masih dibawah target karena lingkungan disekitar rumah masih belum

sepenuhnya menunjang untuk rumah dan bangunan bebas jentik dan memungkinkan kasus bisa meningkat.

d. Keluarga Memiliki Sarana Kesehatan Lingkungan

Keluarga yang memiliki akses sumber air bersih dari PDAM tahun 2003 sebesar 44,4%, tahun 2004 sebesar 62%, dan tahun 2005 sebesar 82%. Terjadinya peningkatan keluarga yang memiliki akses air bersih dan tersedianya sarana air bersih yang lebih banyak. Penduduk yang menggunakan jamban keluarga (Jaga) yang memenuhi syarat tahun 2003 sebesar 72.96%, tahun 2004 turun menjadi sebesar 56.35% dan tahun 2005 naik menjadi sebesar 65.9%. Limbah terbesar di Kota Banjarmasin adalah limbah rumah tangga termasuk sampah. Sarana pembuangan limbah cair seperti air buangan bekas cucian tidak tersedia karena kondisi geografis berawa-rawa sehingga limbah rumah tangga langsung dibuang ketanah.

e. Institusi Dibina

Pembinaan kesehatan lingkungan juga dilakukan pada institusi yaitu sarana pendidikan, sarana ibadah perkantoran dan sarana lainnya yang ada dikota Banjarmasin. Sarana kesehatan yang dibina tahun 2005 ada sebanyak 71 buah, sarana pendidikan sebanyak 456 buah, sarana ibadah sebanyak 655 buah dan sarana perkantoran sebanyak 87 buah.

4.2. Penanganan Limbah Medis

Limbah medis mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan-bahan *infecious*, antiseptik, perban dan barang tercemar lain. Jika tidak dikelola dengan baik bahan-bahan tersebut dapat mencemari sumber air bersih masyarakat yang berada dilingkungan Puskesmas/Rumah Sakit tersebut. Untuk mengatasi masalah limbah medis, mesin incenerator¹ sangatlah diperlukan.

4.3. Kegiatan PHBS

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran/kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Pelaksanaan PHBS dilakukan secara rutin sebagai data dasar dalam pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat khususnya di tatanan rumah tangga
Kampanye PHBS dilakukan rutin baik di tingkat masyarakat ataupun sekolah, hasil terakhir terkait dengan PHBS berdasarkan survey 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Evaluasi PHBS tahun 2006

No.	Kota	Indikator (10 indikator)	Sehat (%)	Tidak Sehat (%)
1	Banjarmasin	b. Linajes	94.7	5.3
		c. Asi Eksklusif	48.0	52.0
		d. JPK	29.7	70.3
		e. Tidak Merokok	67.9	32.1
		f. Mak Sayur	88.9	11.1
		g. Olahraga	79.5	20.5
		h. Air Bersih	90.6	9.4
		i. Jamban	90.7	9.3
		j. Kepadatan	86.9	13.1
		k. Lantai	93.8	6.2
				Indikator Lokal Spesifik
Sehat = 13.7% (semua indikator diisi dengan "ya")				

Sumber: Data Primer, Dinkes Kota

Beberapa kegiatan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) yang dilakukan adalah:

1. Dilakukan pendidikan lingkungan hidup di tingkat pendidikan dasar, menengah dan SLTA, untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem bagi kelestarian alam dan terwujudnya lingkungan sehat. Pelatihan ditujukan untuk para Guru dengan model *Training of Trainer* (TOT).
2. Pelatihan Penyusunan dan Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup untuk para Birokrat dan Anggota Legislatif dengan tujuan memberi bekal kepada birokrat dan anggota legislatif agar dapat menyusun dan menganalisis kebijakan yang memiliki visi lingkungan. Sosialisasi/penyuluhan penanganan limbah domestik (padat dan cair) pada masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran ditingkat rumah tangga melalui cara-cara pemilihan bahan rumah tangga yang mudah terurai dan pemisahan limbah padat organik dan non-organik
3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap sekolah menganjurkan setiap murid supaya memberikan uang sebesar Rp.100,-/anak/ setiap hari Senin. Dana yang terkumpul dikelola untuk membeli keperluan Usaha Kesehatan Sekolah seperti vitamin, PPPK, sabun mandi, sabun tangan cair
4. Kegiatan cuci tangan selalu diajarkan serta dipraktikkan sebelum murid makan pada jeda istirahat.
5. Kegiatan pelayanan kesehatan UKS di beberapa SMP Banjarmasin melalui dua cara yaitu preventif (pencegahan dengan penyuluhan) dan kuratif.

4.4. Pengaruh kampanye yang telah dilakukan

- Posyandu Purnama dan Mandiri

Tahun 2004 posyandu purnama dan mandiri 16%. Tahun 2005 purnama dan mandiri 20%.

- Bayi Mendapat ASI Eksklusif

Bayi yang mendapat ASI Eksklusif di kota Banjarmasin tahun 2005 88.82% dari jumlah bayi yang ada. Wilayah Banjarmasin Utara pencapaian paling tinggi (90.73%).

- Penduduk Menggunakan Sarana Kesehatan

Penduduk yang menggunakan sarana kesehatan terbagi dua yaitu yang menggunakan puskesmas dan rumah sakit. Untuk kota Banjarmasin penggunaan puskesmas lebih banyak untuk rawat jalan. Hal ini disebabkan kota Banjarmasin banyak terdapat rumah sakit.

Jumlah kunjungan ke puskesmas tahun 2005 sebanyak 436.794 kunjungan. Kunjungan Askeskin sebanyak 73.516 kunjungan, kunjungan rawat jalan 383.550 kunjungan, kunjungan rawat jalan > 60 tahun sebanyak 49.998 kunjungan dan kunjungan rawat gigi sebanyak 47.384 kunjungan. Untuk sarana kesehatan rumah sakit dikota Banjarmasin dari data yang masuk tercatat untuk kunjungan rawat jalan sebanyak 33.799 kunjungan dan rawat inap sebanyak 31.385 kunjungan.

- Penduduk Menggunakan JPKM/ Dana Sehat/ ASKES

Dari 602.725 penduduk kota Banjarmasin yang terlindungi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat baru 17.9%.

4.5. Pendekatan & Metoda Kampanye

Metode yang dilakukan adalah :

7. Pengumpulan data
8. Analisa Data
9. Interpretasi data
10. Definisi Operasional

Hasil dari survey PHBS pada th 2006 yaitu rumah tangga dengan kategori sehat hanya sebesar 13,7%.

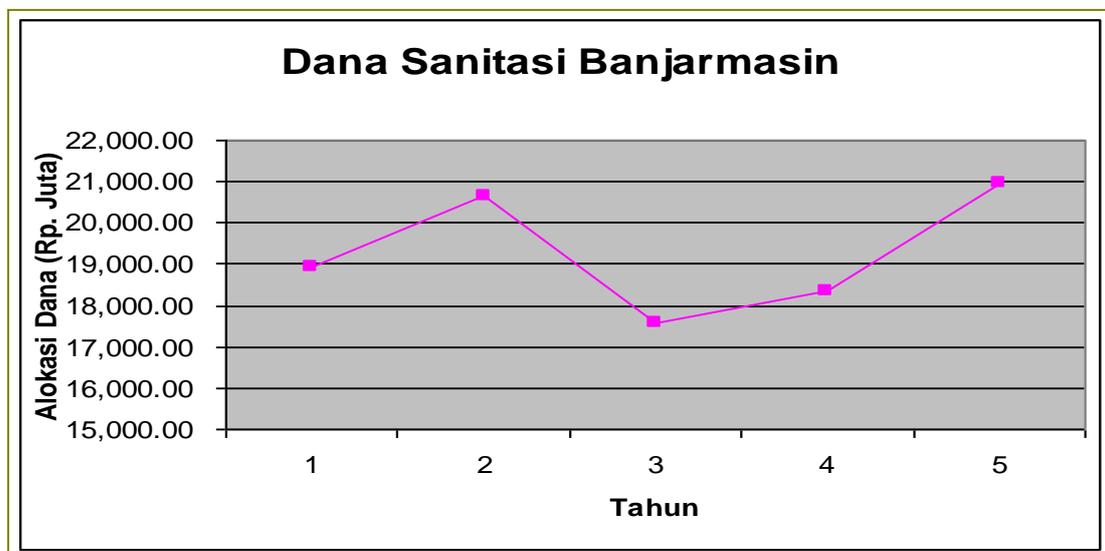
PENDANAAN PROGRAM SANITASI

5. Pendanaan Program Sanitasi

a. Pengeluaran sanitasi lima tahun lalu

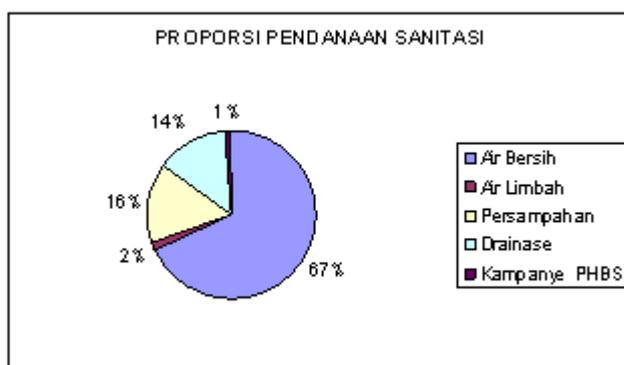
REKAPITULASI DANA SANITASI - APBD KOTA BANJARMASIN

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006
Biaya Sanitasi (Juta Rupiah)	18,921.50	20,625.32	17,573.00	18,325.15	20,954.49



**REKAPITULASI PEMBIAYAAN SANITASI PER SEKTOR
TA 2003 - 2006**

Sektor	Jumlah (Rp. Milyar)	%
Air Bersih	133.94	68%
Air Limbah	3.48	2%
Persampahan	30.73	16%
Drainase	27.82	14%
Kampanye PHBS	2.02	1%
Total	197.99	100%



**APBD KOTA BANJARMASIN TA 2002 - 2006
PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI**

(Dalam Juta Rupiah)

NO.	DINAS /INSTANSI/SEKTOR	TAHUN ANGGARAN					Jumlah
		2002	2003	2004	2005	2006	
A.	Dinas						
1	Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota	6,201.75	12,686.81	11,117.02	10,686.15	8,622.97	49,314.71
2	Dinas Kebersihan & Pengelola Sampah	4,284.20	6,096.97	6,047.98	7,087.00	11,501.94	35,018.09
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,611.54				1,611.54
4	Dinas Kesehatan		230.00	408.00	552.00	829.58	2,019.58
B.	Sektor						
	Program Rehab. & Pemeliharaan Drainase	735.39					735.39
	Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	1,022.46					1,022.46
	Sektor Perumahan & Pemukiman	6,203.57					6,203.57
	Sektor Kesehatan	174.12					174.12
	Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan	300.00					300.00
	TOTAL	18,921.50	20,625.32	17,573.00	18,325.15	20,954.49	96,399.46

b. Rencana biaya pengembangan program sanitasi tahun ini

**RENCANA PROGRAM DAN USULAN KEGIATAN
SEKTOR SANITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007**

No.	Instansi/Dinas	Kegiatan	Jumlah	Keterangan/
1	Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota	Program Pemb. Sal.		
		1 Drainase/Gorong-gorong :		APBD
		a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	5,250,000,000	
		2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jar.Pengairan :		APBD
		a. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2,500,000,000	
		b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Air	2,500,000,000	
		3 Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya :		APBD
		a. Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai	3,000,000,000	
		4 Program Pengendalian Banjir :		APBD
		a. Pembuatan Sistem Pompanisasi	3,526,255,000	
5 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :		APBD		
a. Rehabilitasi Titian Ulin dan Jalan Lingkungan	20,800,044,500			
		Sub Total 1	37,576,299,500	

No.	Instansi/Dinas	Kegiatan	Jumlah	Keterangan/
2	Dinas Kebersihan & Pengelolaan Sampah	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :		APBD
		a. Penyediaan Prasarana & Sarana Persampahan	4,587,000,000	
		b. Peningkatan O & P Prasarana & Sarana Persampahan	6,957,000,000	
		c. Kerjasama Pengelolaan Sampah	2,105,341,000	
		Sub Total 2	13,649,341,000	
3	Dinas Kesehatan	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	243,532,500	APBD
		2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	412,215,000	APBD
		3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	94,435,000	APBD
		4 Program Kampanye Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)	100,000,000	
			Sub Total 3	850,182,500
4	Bapedalda	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :		
		a. Rehab dan Peningkatan Bangunan TPA Organik	125,000,000	APBD
		b. Sosialisasi Contoh Model TPA Organik di Masyarakat	400,000,000	APBD
		Sub Total 4	525,000,000	
		Total	52,600,823,000	

c. Trend biaya program sanitasi kedepan

Masih dalam proses

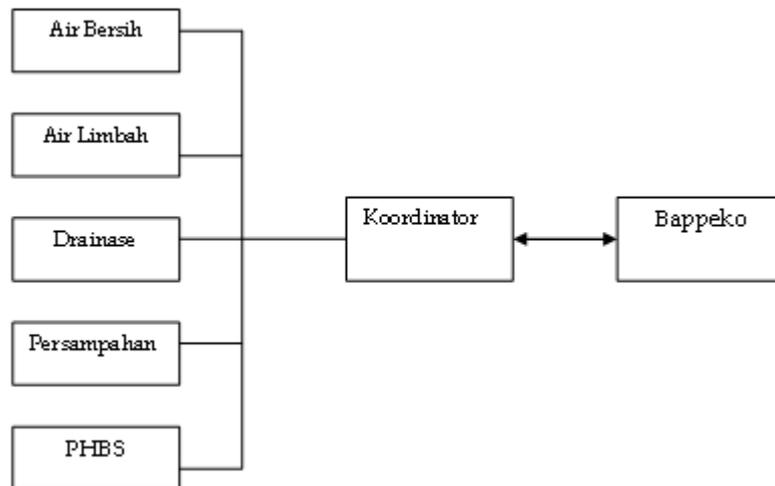
KELEMBAGAAN & REGULASI YANG TERKAIT DENGAN PROGRAM SANITASI

6. Kelembagaan & regulasi yang terkait dengan program sanitasi

Tabel 6.1. Instansi/Dinas yang terkait langsung dengan Sektor Sanitasi di Banjarmasin

Instansi/Dinas	Tugas
1. Badan Perencanaan Kota (Bappeko)	Koordinator, penyiapan program dan pembiayaan
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota (Kimprasko)	Menangani sistem drainase kota
3. Dinas Kebersihan & Pengelolaan Sampah (DKPS)	Menangani masalah kebersihan & pengelolaan sampah
4. Dinas Kesehatan	Menangani urusan kesehatan masyarakat kota
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda)	Menangani masalah lingkungan hidup
6. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih
7. Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL)	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah cair
<i>Disamping Instansi/Dinas diatas, program sanitasi di Kota Banjarmasin sangat didukung oleh :</i>	MUI, PKK, Statistik, Dinas Pendidikan Nasional (Dikna), Dinas Tata Kota, Infokom, Pemberdayaan, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi & Hukum, BPN, PLN, Pertanian

Banyaknya lembaga-lembaga yang ada menyulitkan koordinasi sehingga kurangnya efektifitas kerja. Dikaitkan dengan upaya memadukan kelima komponen sanitasi perlu difikirkan satu koordinator untuk mengkoordinasikan semua program, seperti diagram di bawah:

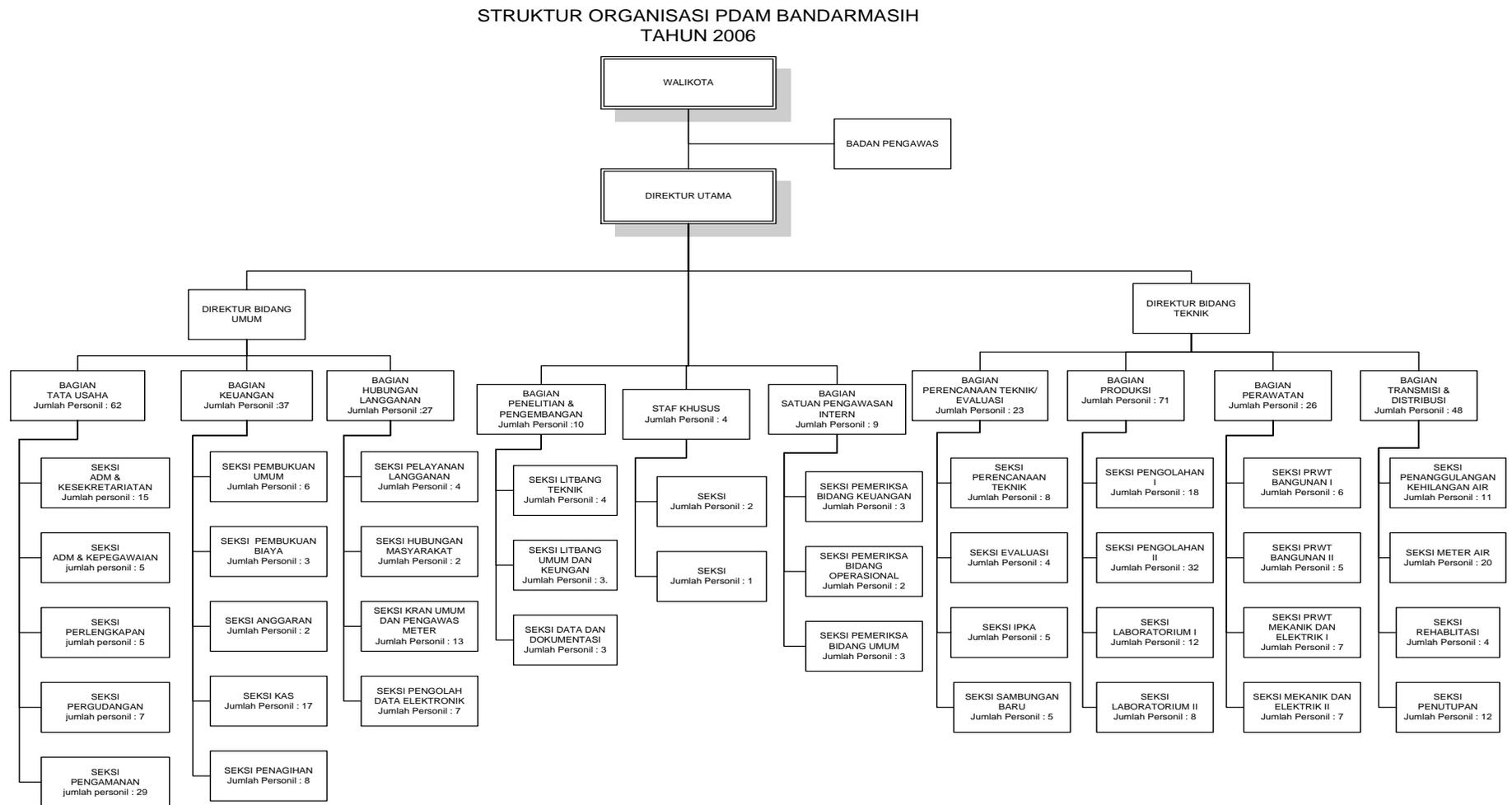


	Nomor	Judul
Tabel 6.2. Regulasi/Peraturan Daerah / Perda yang terkait dengan Sektor Sanitasi	3 Tahun 1995	Pelayanan Kesehatan
	10 Tahun 1996	Pemberian Izin & Retribusi Undang-undang Gangguan
	8 Tahun 1998	Retribusi dan Pemakaian Alat Penyedot Kakus
	16 Tahun 2006	Tarif Jasa Pelayanan Air Limbah
	10 Tahun 2001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
	11 Tahun 2001	Pengawasan dan Persyaratan Sanitasi, Retribusi Tempat-tempat Umum dan Pengolahan Makanan
	11 Tahun 2002	Retribusi Pelayanan Kesehatan
	12 Tahun 2003	RUTRK Banjarmasin

Kurangnya sosialisasi Perda sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat, sehingga Perda tidak efektif dilaksanakan. Dan tidak adanya pelimpahan wewenang dari Dinas ke kecamatan dan Kelurahan sehingga penegakkan Perda menjadi sangat sulit. Karena pengawasan terhadap Perda lemah maka pada pelaksanaan/penegakkan menjadi terhambat.

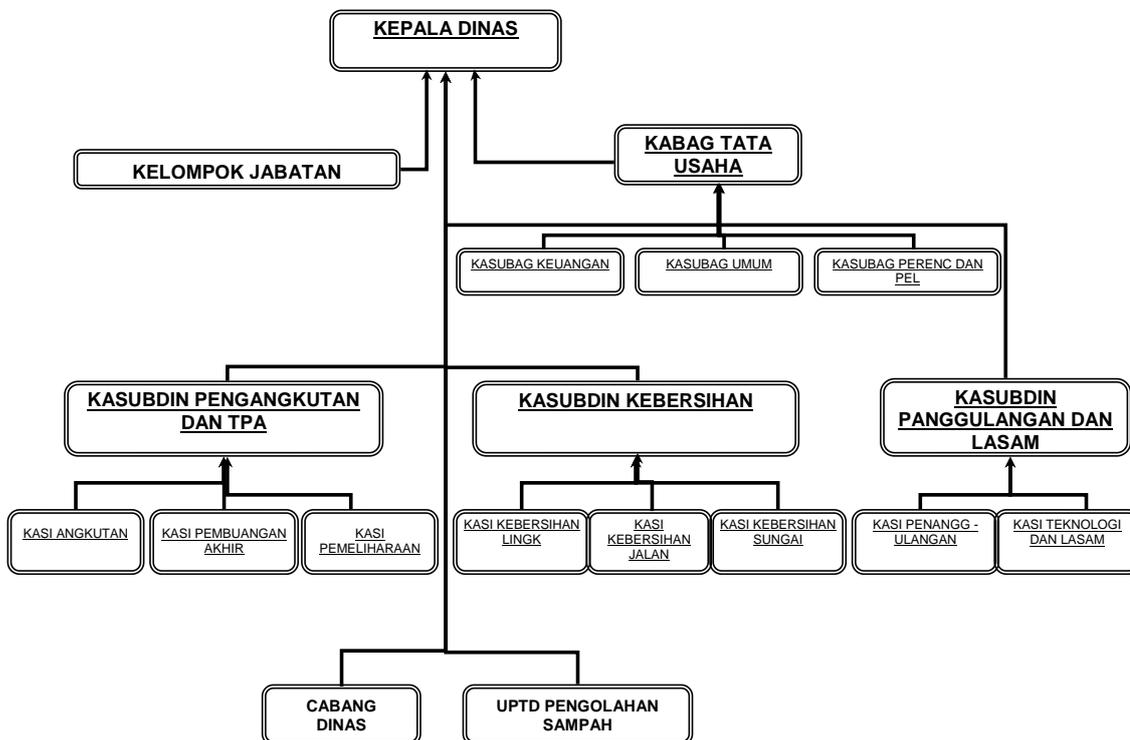
(1) Air Bersih

Gambar 6.1. Sruktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin



(2) Persampahan

Gambar 6.2.
Struktur Organisasi DKPS



Tabel 6.3. Daftar Tenaga Kerja

NO.	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	28
2	Tenaga Honor	7
3	Tenaga Operasional	8
4	Tenaga Sopir	26
5	Tenaga Angkutan	149
6	Kebersihan Sungai	30
7	Penyapuan Pasar	50
8	Penyapuan Jalan	50
9	Pengawas Kebersihan	15
10	Penanggulangan	80
11	Pemusnahan Sampah	10
12	Pekerja Ritasi II dan III	175
13	Mekanik/Operator	5
	Jumlah	633

Tabel 6.4.
Tarif Retribusi Perda No. 4 Tahun 2000

Golongan/Klasifikasi	Tarif / bulan (Rp)	Keterangan
a. Sosial		
S-1	500	250va s/d 900 va
S-2	1.000	
S-3	2.000	
b. Rumah Tangga		
R-1	1.000	
R-2	1.500	
R-3	7.000	
c. Bisnis		
B-1	10.000	
B-2	20.000	
B-3	50.000	
d. Industri		
I-1	10.000	
I-2	20.000	
I-3	40.000	
I-4	75.000	
e. Perkantoran		
P-1	10.000	
P-2	20.000	
Toko/Kios/Warung :		
- Los/Bak	3.000	Setiap Toko, Kios, Warung, Los /Bak yang menggunakan Listrik secara bersama-sama
- Warung	6.000	
- Kios/Toko	10.000	
Pedagang Kaki Lima	200	Retribusi harian

Sampai saat ini tidak ada masalah dengan pemungutan retribusi karena Pemko Banjarmasin bekerjasama dengan PT. PLN dalam pemungutan retribusi tiap bulan dari masyarakat

Tabel 6.5.
Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2006 sampai dengan bulan September 2006

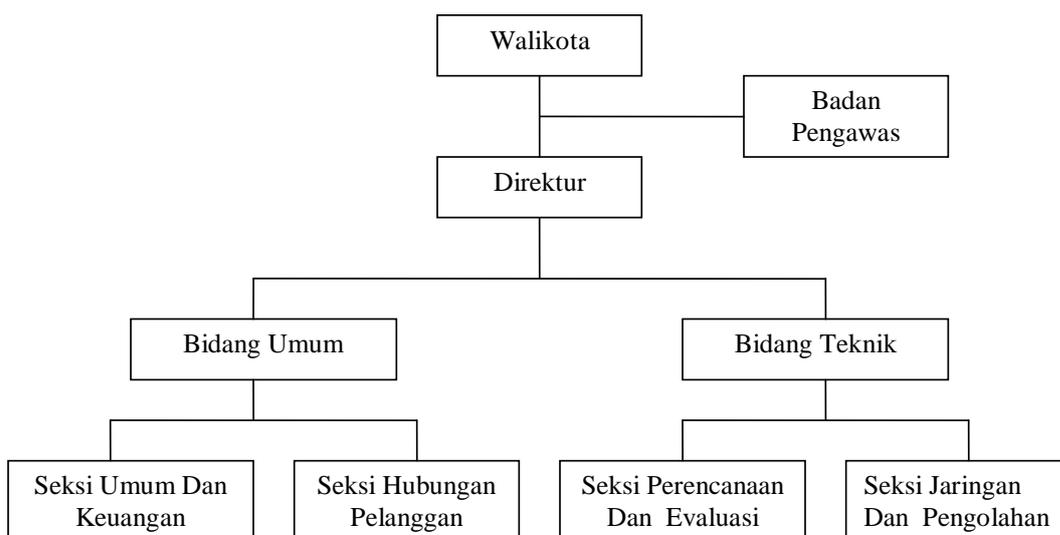
No.	Bulan	Retribusi Kebersihan (Rp.)	Retribusi Tinja (Rp.)
1	Januari	205,100,750.00	520,000.00
2	Februari	190,796,750.00	700,000.00
3	Maret	197,264,800.00	750,000.00
4	April	197,715,000.00	750,000.00
5	Mei	190,767,269.00	800,000.00
6	Juni	198,184,150.00	800,000.00
7	Juli	186,685,900.00	800,000.00
8	Agustus	196,770,150.00	500,000.00
9	September	201,664,050.00	700,000.00

(3) Drainase

Gambar 6.3. Struktur Organisasi Kimprasko, lihat lembar berikutnya

(4) Air Limbah

1. Sejarah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin :
 - a. Program dimulai sejak tahun anggaran 1995/1996 dalam kerangka KUDP yang dananya berasal dari IBRD Loan No. 3854 - IND.
 - b. Pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Dati II Banjarmasin terbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pilot Project Air Limbah Kotamadya Banjarmasin yang merupakan bagian dari PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.
 - c. Tahun 1998 - 2000, dimulai pembangunan Pilot Project Sistem Pengolahan Limbah terpusat dengan dibangunnya WWTP/IPAL dan jaringannya sebanyak 200 sambungan untuk kawasan pusat kota/komersial dengan luas pelayanan 16,5 Ha atau 0,2% luas wilayah kota yaitu di Jalan Lambung Mangkurat dan sekitarnya. Kapasitas pengolahan yang dibangun sebesar 500 m³/hari.
 - d. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2006, status UPT berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin(PDPAL). Sebelum menjadi PDPAL operasional IPAL Banjarmasin dibiayai melalui proyek pengelolaan yang disalurkan melalui Dinas Kimprasko Banjarmasin. Setelah menjadi PD. PAL pembiayaan masih dalam proses penyusunan. (menunggu proses penetapan direksi?)
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. PAL Kota Banjarmasin
Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2006 Gambar 6.4. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin sebagai berikut:



ANALISA AWAL TERHADAP SITUASI YANG ADA

Faktor analisa awal pelayanan sanitasi mengandung aspek-aspek teknis teknologis, keuangan dan kelembagaan/manajerial yang terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pengelolaan sanitasi, di Kota Banjarmasin. Lebih jelasnya, masing-masing aspek yang termasuk dalam faktor internal akan diuraikan pada sub-sub bab berikut ini.

7.1. Aspek Teknis

a. Sub Sektor Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pasokan air baku yang bersumber dari Intake Sungai Tabuk terutama pada musim kemarau • Peralatan pendukung sistem produksi dan distribusi pada IPA I A. Yani sudah berusia tua. • Kehilangan air pada sistem produksi dan distribusi masih di atas 28% • Jaringan distribusi belum seluruhnya mencukupi untuk mengantisipasi lajunya pertumbuhan penduduk.
b. Sub Sektor Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat pelayanan yang terjadi diantaranya disebabkan oleh rendahnya retribusi kebersihan yang dapat ditarik dibanding dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan, kekurangan peralatan dan rendahnya peran serta masyarakat.
c. Sub Sektor Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem yang ada sekarang sangat tidak jelas. Daerah / satuan wilayah pengendali genangan (SWPG) belum dapat dijabarkan secara jelas dilapangan. • Banyak dari sungai / saluran yang ada tidak berfungsi disebabkan oleh banyak hal, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan rumah / gedung diatas dan dibantaran sungai / saluran. - Saluran / sungai telah dipenuhi oleh sampah - Saluran / sungai telah dipenuhi oleh lumpur dari hulu - Pembangunan perumahan / gedung yang tidak memperhatikan sistem drainase sehingga terjadi peluapan air pada saat pasang / hujan. • Dengan sebab diatas maka kegiatan yang paling mendasar

dilakukan adalah membenahi sistem skala makro. Studi (Bapeko - 2006) yang telah dilakukan dikaitkan dengan data dasar sistem drainase dapat digunakan sebagai landasan awal.

- d. Sub Sektor Air Limbah
- Pelayanan Prasarana dan Sarana sistem Sistem Sanitasi terpusat (off-site) masih sangat rendah.
 - Penggunaan saluran drainase sebagai tempat pembuangan tinja manusia masih relatif tinggi.
 - Replikasi Pengembangan Sistem Sanitasi masyarakat masih kurang.
 - Akses penduduk terhadap pelayanan prasarana dan sarana dasar air limbah (cubluk dan tangki septik yang dilengkapi dengan bidang resapan) masih relatif rendah.
 - Pengembangan prasarana dan sarana sanitasi di awal pelaksanaan otonomi menurun.
 - Pengolahan air limbah non WC masih rendah.
 - Data mengenai jenis sarana onsite termasuk penyebarannya masih langka.
 - Penelitian untuk pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat masih kurang.
 - Pencemaran air tanah dan air permukaan di daerah perkotaan semakin meningkat.
 - Pencemaran air baku telah meningkatkan biaya produksi air minum.
 - Data indikator monitoring kesehatan dan lingkungan masih langka.
-

7.2. Aspek Sosial Budaya

- a. Sub Sektor Air Bersih
- Pemanfaatan air bersih PDAM oleh masyarakat masih belum optimal, kebanyakan hanya digunakan untuk kebutuhan masak dan minum, disebabkan sebagian masyarakat bertempat tinggal di pinggir sungai masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan air bersihnya.
 - Kesadaran akan pentingnya peranan air bersih terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih kurang.
- b. Sub Sektor Persampahan
- Kebiasaan masyarakat yang hidup di atas dan dibantaran sungai selama berpuluh bahkan beratus-ratus tahun sangat sulit dihilangkan. Dampak buruk yang ditimbulkan adalah kebiasaan membuang sampah langsung kesungai.
 - Diperlukan selain Perda yang mengatur tentang fungsi sungai, harus diiringi dengan kampanye penyadaran terkait dampak buruk pembangunan rumah / bangunan di atas
-

	<p>maupun bantaran sungai. Ditambah lagi perlunya penyadaran tentang buruknya kebiasaan membuang sampah kesungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program kali bersih / bedah sungai sangat diperlukan.
c. Sub Sektor Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat dari kebiasaan masyarakat membangun diatas /dibantaran sungai sangat berpengaruh terhadap fungsi saluran drainase / sungai. • Walaupun sudah ada Perda sungai dan Perda lainnya tentang larangan membangun rumah / gedung, akan tetapi karena pengawasan sangat lemah, hal itu tidak banyak berpengaruh. Masih banyak dijumpai pembangunan baru diatas / dibantaran sungai.
d. Sub Sektor Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Prasarana dan Sarana sistem Sistem Sanitasi terpusat (off-site) masih sangat rendah. • Replikasi Pengembangan Sistem Sanitasi masyarakat masih kurang. • Akses penduduk terhadap pelayanan prasarana dan sarana dasar air limbah (cubluk dan tangki septik yang dilengkapi dengan bidang resapan) masih relatif rendah. • Pengolahan air limbah non WC masih rendah. • Data mengenai jenis sarana onsite termasuk penyebarannya masih langka. • Penelitian untuk pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat masih kurang. • Pencemaran air tanah dan air permukaan didaerah perkotaan semakin meningkat. • Pencemaran air baku telah meningkatkan biaya produksi air minum.

7.3. Aspek Kelembagaan & Regulasi

a. Sub Sektor Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan Konsumen dan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum (BPSPAM) akan dampak terhadap timbulnya komplain oleh konsumen sehubungan dengan pelayanan air minum bagi masyarakat. • Adanya kebijakan desentralisasi fiscal UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berimbas pada perlambatan program pengembangan PDAM. • Penerapan kebijakan Otonomi Daerah 1 januari 2001 mengakibatkan berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan PDAM sehingga menimbulkan egoitisme otoritas
--------------------------	---

	<p>daerah dalam pengambilan asset PDAM yang masuk pada daerah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keungan No. 107 Tahun 2005 tentang penyelesaian hutang yang belum dapat menyetujui penghapusan/pengurangan denda dan bunga pinjaman PDAM berdampak pada performance keuangan dan pengembangan PDAM kedepan.
b. Sub Sektor Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya beberapa pelaku dibidang pengelolaan sampah, menyebabkan perlu dibenahi kembali terkait dengan fungsi regulator & operator. Sejauh ini antara DKPS, Bapedalda, Kimprasko, Dinkes, Dinas Pasar masih nampak kurang koordinasi.
c. Sub Sektor Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa Instansi/Dinas yang menangani sanitasi dengan programnya masing-masing/terpisah • Sumber daya manusia yang ada masih sangat kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian perlu difikirkan tentang penambahan tenaga di sub-sektor ini serta peningkatan kualitasnya sekaligus. • Kebanyakan masyarakat tidak tahu ada Peraturan/Perda yang mengatur masalah sanitasi • Peraturan/Perda yang ada belum sepenuhnya diterapkan
d. Sanitasi Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Replikasi Pengembangan Sistem Sanitasi masyarakat masih kurang. • Pengembangan prasarana dan sarana sanitasi di awal pelaksanaan otonomi menurun. • Data mengenai jenis sarana onsite termasuk penyebarannya masih langka. • Penelitian untuk pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat masih kurang. • Data indikator monitoring kesehatan dan lingkungan masih langka.

7.4. Aspek Pembiayaan

a. Sub Sektor Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya biaya operasional yang ditanggung perusahaan. • Pengembalian hutang jangka panjang yang belum sesuai jadwal • PDAM belum Full Cost Recovery (FCR) oleh karena beban hutang dan bunga pinjaman yang terus bertambah dan sulit untuk terlunaskan.
b. Sub sector	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan dari cara pembayaran dari PLN ke PDAM

Persampahan	<p>diprediksi akan menyebabkan pemasukan retribusi sampah akan makin berkurang. Diperlukan peninjauan ulang terkait dengan system penarikan retribusi ini. Disisi lain diperlukan evaluasi yang lebih mendalam tentang potensi pembayar retribusi sampah. Disisi lain program 3R harus lebih ditingkatkan sehingga pembiayaan dalam pengangkutan sampah akan makin berkurang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan TPA dan pengangkutan sampah dengan truk / tosa juga perlu ditinjau ulang untuk upaya peningkatkan efisiensi biaya. • Program kerja sama dengan fihak swasta juga perlu terus digalakkan.
c. Sub sector Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan terkait dengan pemeliharaan jaringan perlu didukung dengan program yang lebih strategis. Sejauh ini ada kesan perbaikan / normalisasi saluran hanya memindahkan permasalahan. • Perlu juga difikirkan pembangunan jaringan drainase yang lebih baik dilingkungan pemukiman yang dilakukan oleh para pengembang. Akibat buruknya sistem drainase didaerah-daerah pemukiman ini, menyebabkan persoalan drainase kota bertambah. Ujung-ujungnya menjadi beban pemerintah kota.
d. Sub Sektor Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pengolahan air limbah saat ini dipukul rata yaitu 25% dari tarif penggunaan air bersih PDAM. Perlu mulai difikirkan filosofis bahwa polluter must pay atau yang melakukan pencemaran harus membayar. Proporsi yang lebih adil harus ditegakkan sehingga yang menimbulkan pencemaran sebenarnya harus ditentukan oleh bukan hanya air jumlah air buangnya akan tetapi kualitasnya juga. • Demikian juga tarif harus diberlakukan lebih besar kepada fihak-fihak yang lebih mampu. Bila dimungkinkan tidak ada pungutan terhadap keluarga miskin. • Pelibatan fihak swata didalam pengelolaan air limbah sangat diperlukan, terutama untuk daerah-daerah dimana system PD PAL tidak / belum dapat melayani.



Bab - 8

RUMUSAN AWAL PERMASALAHAN & ALTERNATIF PENYELESAIAN

8. Rumusan awal permasalahan & alternatif penyelesaian

Pengelolaan sanitasi di Kota Banjarmasin telah sedemikian kompleks yang melibatkan pelaku-pelaku utama pengelolaan sanitasi, yaitu:

1. Masyarakat: orang perorang maupun komunitas masyarakat.
2. Pemerintah: Pemerintah daerah.
3. Pelaku Usaha: produsen, penjual, pedagang, jasa.

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Pengelolaan permasalahan sanitasi yang ada pada setiap pelaku utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Aspek teknis	terkait masalah pendataan masih diperlukan upaya-upaya yang lebih cermat untuk memperoleh data yang akurat, lengkap & tepat waktu. Penggunaan sistem informasi dengan sistem geografis kelihatannya akan memudahkan semua pihak turut terlibat didalam perolehan data yang diharapkan.
b. Aspek sosial budaya	kebiasaan <u>sebagian</u> masyarakat yang selalu menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan hajat & sampah harus mulai dihilangkan, karena akan memperberat pencemaran sungai, sehingga kebiasaan mandi - cuci tidak layak dilakukan. Upaya pencerahan melalui ceramah-ceramah keagamaan diindikasikan paling sesuai. Disisi lain mengingat upaya pelesatarian lingkungan kebiasaan mandi - cuci juga sebenarnya harus sudah mulai dihilangkan. Penggunaan sabun dan pelbagai bahan detergen akan merusak tatanan kehidupan dalam sungai.
c. Aspek kelembagaan & regulasi	koordinasi antar instistusi harus lebih ditingkatkan melalui satu sistem lebih efektif (al.penggunaan pusat informasi data).Beberapa kelembagaan yang ada perlu ditata ulang, terutama dikaitkan dengan pengelolaan sampah. Program - program yang ada seharusnya dilakukan lebih terpadu.Seharusnya ada kesamaan lokasi yang akan dibangun sesuai dengan skala prioritas. Pembangunan selalu harus dilakukan secara bersamaan (bila dimungkinkan). Sertifikasi oleh BPN harus diberikan setelah semua dinas terkait setuju (Bappeko, Distako, Kimprasko, Bapedalda). Hal yang sama juga untuk peraturan-peraturan terkait dengan tupoksi, lingkungan & penataannya.
d. Aspek pembiayaan	perlu dukungan dana yang lebih besar dari pemerintah dan pihak swasta untuk pembangunan prasarana & fasilitas sanitasi. Terutama untuk perumahan yang berada dilapis ketiga (mungkin kedua). Ditingkat keluarga perlu diupayakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Kegiatan pelatihan-pelatihan yang dimotori oleh Dinas Tenaga Kerja (Balai Latihan Kerja) sangat diperlukan. Termasuk juga untuk pemanfaatan sampah rumah tangga.

STRATEGI SANITASI KOTA

10. Strategi Sanitasi Kota

Strategi sanitasi skala kota didasarkan atas empat tonggak utama, yaitu :

Penentuan skala prioritas lokasi, yang dilandaskan pada kepadatan penduduk, tingkat sosial - ekonomi masyarakat, kondisi sarana & prasarana dibidang sanitasi serta kondisi kesehatan masyarakatnya.

Mendahulukan masyarakat yang telah siap, dalam arti mau berpartisipasi aktif didalam pembangunan. Atau masyarakat yang sudah mampu berorganisasi dan mampu bekerja secara terkoordinisasi.

Lebih mensinergikan sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan sehat.

Menggunakan teknologi tepat guna serta mampu dibiayai bila dimungkinkan oleh masyarakat sendiri.

Konsep awal strategi sanitasi kota telah disusun berdasarkan Renstra dari Kota dan SKPD yang ada. Secara lengkap terkait dengan konsep strategi sanitasi skala kota ini dapat dilihat melalui Lampiran 6 Konsep Strategi Program Pengembangan Sanitasi Kota Banjarmasin.

Di Banjarmasin konsep strategi dibidang sanitasi juga telah mulai diujicobakan disatu lokasi pilot. Gambaran lebih jelas tentang lokasi & kegiatan didaerah pilot dapat dilihat melalui Lampiran 7.

Bab - 10

PROGRAM DINAS

(1) Air Bersih

Menyinkapi perkembangan Kota Banjarmasin yang semakin pesat seiring dengan tuntutan zaman di era reformasi melalui paradigma baru, berbagai upaya pengembangan baik internal maupun eksternal telah dilakukan, sehingga diharapkan PDAM Bandarmasih dapat tetap eksis dalam memberikan pelayanan air bersih kepada warga masyarakat Kota Banjarmasin sesuai standar yang telah ditentukan.

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang tertuang dalam Business Plan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin 2003-2007 telah disusun beberapa kebijakan strategis PDAM Bandarmasih sebagai acuan dan arahan program pengembangan usaha yang diharapkan rencana kegiatan perkembangan dapat berjalan secara terarah dan terpadu sesuai yang telah dirumuskan.

Visi : Menjadi Perusahaan Air Minum Yang Mandiri, Profesional Dan Terbaik
Dalam Pelayanan

Artinya dalam menjalankan usaha 2 tahun kedepan menjadikan perusahaan sehat dengan indikasi Rasio Operasi 100%. Selanjutnya merencanakan pengembangan cakupan pelayanan yang bertumpu pada kemampuan yang dimiliki dan pelayanan prima tercermin dari terjaminnya pasokan air baku sepanjang musim, sehingga kontinuitas pengaliran air bersih kepada konsumen dapat 24 jam per hari.

Misi : PDAM Bandarmasih Full Cost Recovery

- Karyawan profesional dan sejahtera
- Standarisasi kualitas pelayanan
- Memberikan kontribusi bagi pendapatan Asli Daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan adalah menjadikan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sehat dan dapat berkembang secara mandiri sebagaimana layaknya sebuah perusahaan penyedia air bersih.

Prinsip dasar yang digunakan dalam menjalankan langkah kebijakan strategis PDAM Bandarmasih sesuai dengan Visi dan Misi adalah *Dukungan Beberapa Aspek Kegiatan Oleh Seluruh Stakeholders*. Stakeholders yang dimaksud adalah Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Banjarmasin selaku pemilik, Eksekutif, Legislatif/ DPRD, Pemerhati PDAM, LSM, Akademisi, Pelanggan dan Masyarakat.

Langkah- langkah strategis yang dilaksanakan adalah :

- *Business Plan*. Disusun oleh Tim intern PDAM Bandarmasih yang bertujuan sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan program pengembangan secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Pedoman dasar dalam penyusunan program berorientasi pada sifat ; konseptual, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Hasil penyusunan disosialisasikan melalui lokakarya kepada seluruh stakeholders untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan program.
- *Transparan*, Dalam kegiatan usahanya PDAM Bandarmasih selalu terbuka, hasil-hasil audit kondisi internal (seperti neraca keuangan dan laporan laba/rugi PDAM) diinformasikan melalui media cetak sesuai dengan opini masyarakat. Disamping itu juga menyampaikan data-data yang diperlukan pihak legislatif.

- *Komitmen & Konsisten.* Pemerintah Kota Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih beserta jajarannya komitmen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perusahaan melalui kebijakan strategis, seperti Pemerintah Daerah menunda penarikan kontribusi PAD sampai PDAM dinyatakan sehat dan dapat mandiri, mendukung restrukturisasi dan rescheduling pengembalian hutang pinjaman melalui penghapusan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dukungan moril dan materil terhadap program PDAM serta kebijakan operasional berupa dukungan atas program-program PDAM yang telah disusun/disepakati.
- *Sosialisasi.* Melaksanakan sosialisasi terhadap program dan permasalahan operasional PDAM kepada pelanggan melalui media cetak dan elektronik, sehingga diharapkan pelanggan dapat mengetahui program yang sedang atau akan dilaksanakan dan mengantisipasi terhadap permasalahan. Disamping itu dilaksanakan pertemuan forum tatap muka antara pelanggan dan PDAM 2 kali sebulan dalam rangka mendapatkan masukan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai harapan.
- *Sukses Kecil.* Selalu berpandangan dari hal-hal yang kecil dapat berjalan dengan baik/ sukses baik teknis maupun administrasi, yang berlanjut menjadi sukses besar dan berlangsung secara kontinu. Sebagai contoh informasi kondisi keuangan PDAM melalui media cetak, kartu kuning pencatat meter pelanggan, informasi pelayanan pelanggan dan lain-lain.

Sasaran utama yang akan dicapai adalah peningkatan kinerja PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Pengembangan Pelayanan

Cakupan pelayanan tahun 2011 sebesar 98 % dari total jumlah penduduk kota Banjarmasin sebanyak 686.450 jiwa dengan jumlah pelanggan sebanyak 120.703 sambungan serta pelayanan berwawasan regional.
2. Full Cost Recovery

Rasio antara pendapatan dibagi biaya melebihi 100%, termasuk di dalamnya PDAM dapat membayar tanggung jawab hutang serta dapat memperbaiki atau mengganti peralatan-peralatan sistem produksi dan distribusi.
3. Pelayanan Prima

Seluruh wilayah kota Banjarmasin terlayani PDAM dengan kualitas air minum (17 zona air minum tahun 2011), kontinuitas pengaliran selama 24

jam sepanjang tahun serta layanan pelanggan yang cepat, tepat, mudah dan bersahabat.

PROGRAM KEGIATAN

A. BIDANG TEKNIK

a. Optimalisasi Sistem Produksi dan distribusi, yaitu :

- Penurunan kehilangan air, melalui kegiatan rehabilitasi jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan sebanyak 30.000 unit, yang direncanakan pertahun 6.000 buah.
- Optimalisasi IPA Pramuka dari 500 lt/dt menjadi 700 lt/dt
- Optimalisasi IPA Yani dari 526 lt/dt menjadi 626 lt/dt melalui rehabilitasi bangunan instalasi media filter serta sistem pembubuhan bahan kimia
- Rehabilitasi intake S.Bilu dari 520 lt/dt menjadi 660 lt/dt
- Pengadaan pompa intake S.Tabu, S.Bilu dan IPA Yani
- Pengadaan Genset S.Tabuk dan S.Parman 850 + 500 KVA
- Relokasi jaringan pipa distribusi rimer jembatan Dewi-jalan Pos \varnothing 400 mm - 630 m sepanjang 600 mtr
- Optimalisasi penerapan sistem blok dan pemetaan pelanggan ke dalam GIS
- Meningkatkan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat

b. Pengembangan Sistem produksi dan distribusi, yaitu :

- Pembangunan intake S Tabuk kapasitas 500 lt/dt berikut peralatan pendukung
- Pemasangan ipa transmisi air baku \varnothing 630 mm panjang 7 km dari intake S.Tabuk ke intake Pematang Panjang.
- Pemasangan jaringan pipa distribusi primer IPA Pramuka - Basirih \varnothing 500 mm sepanjang 8 km
- Pemasangan jaringan pipa distribusi primer IPA Pramuka - Sultan Adam \varnothing 500 mm sepanjang 7 km

- Pembangunan reservoir Basirih & Sultan Adam masing-masing kapasitas 2.500 m³, booster pump dan bangunan pelengkap
- Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi dalam kota \varnothing 50 - 300m sepanjang 8 km
- Penambahan jumlah sambungan 29.150 unit

REALISASI PROGRAM PENANGANAN AIR BAKU

PROGRAM INTAKE SUNGAI BILU

- ✚ Program PDAM (2002) peningkatan suplai air baku dari 500 lt/dt menjadi 520 lt/det dengan pekerjaan rehab intake Sungai Bilu dan pengadaan-pemasangan pipa transmisi \varnothing 630 mm panjang 1.200 meter dari Intake S.Bilu



s/d
IPA

A.Yani. Total biaya pelaksanaan Rp. 3.50 milyar (Realisasi).

Pemasangan Pipa Transmisi \varnothing 630 mm

Rehabilitasi Intake Sungai Bilu

PROGRAM INTAKE S.TABUK

- ✚ Program PDAM/El-Nino (2002) penambahan kapasitas suplai air baku sebesar 400 lt/det dengan pekerjaan rehabilitasi intake Sungai Tabuk dan pengadaan-pemasangan pipa transmisi \varnothing 630 mm sepanjang 2.954 meter dari Intake Emergensi Sungai Ulin sampai dengan waduk *pilot schem*. Total biaya pelaksanaan Rp. 6,7 milyar (Realisasi).



102

Rehabilitasi Intake Sungai Tabuk Pemasangan Pipa Transmisi Ø=630 mm

- ✚ Program Tahap I (2002) peningkatan kapasitas menjadi 600 lt/det dengan pekerjaan rehab intake Tabuk berikut pompa, perpipaan, daya PLN dan pengadaan-pemasangan pipa transmisi Ø 1.000 mm sepanjang 1.700 meter mulai dari Intake Sungai Tabuk s/d Intake *Pilot Scheme*. Total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 9,6 milyar (Realisasi).



Pemasangan Pipa Transmisi Ø=1.000 mm Pekerjaan Jembatan Pipa Ø=1.000 mm

- ✚ Program Tahap II (2003) kapasitas menjadi 900 lt/det, berupa lanjutan sisa pekerjaan Tahap I beserta pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi Ø 800 mm sepanjang 3.700 meter (waduk *pilot scheme* s/d Intake Pematang). Total biaya sebesar Rp. 18,04 milyar (Realisasi).



Pemasangan Pipa Transmisi Ø=800 mm

Proses Penyambungan Pipa Ø=800 mm

- ✚ Program Tahap III (2004-2005) peningkatan kapasitas menjadi 1.875 lt/det dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan transmisi Ø 800 mm sepanjang 7.800 meter dengan biaya Rp. 33 milyar dan pembangunan IPA 500 lt/dt dengan biaya Rp 42 milyar (Rencana).

KEGIATAN INVESTASI DAN KELAYAKAN PROGRAM PDAM BANDARMASIH TAHUN 2007-2011

A. Investasi

Rencana Pembiayaan program corporate plan mulai tahun 2007-2011, yang terdiri 7 (tujuh) program sebagai berikut :

Tabel 10.1. Rencana Investasi (Rp.000)

No.	BIDANG PROGRAM	BIAYA
1.	Bidang Pelayanan Pelanggan	1.865.000,-
2.	Bidang Keuangan	9.410.000,-
3.	Bidang Organisasi & Manajemen	815.000,-
4.	Bidang Personalia & SDM	6.099.500,-
5.	Bidang Hukum	485.000,-
6.	Bidang Teknik	218.664.500,-
7.	Studi	1.150.000,-
JUMLAH		238.489.000,-

Dari total rencana pembiayaan program tersebut di atas, sumber pendanaannya diusulkan berasal dari :

1. Equity PDAM Rp 124.489.000 juta
2. Penyertaan Modal Rp 114.000.000 juta

B. Kelayakan Program

Dari hasil perhitungan kelayakan investasi program optimalisasi dan pengembangan dengan asumsi tingkat bunga (interest rate komersial) 12 %, maka diperoleh FIRR = 12,27 % dan NPV = 152,920 juta, yang artinya bahwa program tersebut layak untuk dilaksanakan karena $FIRR > \text{Interest Rate}$ ($12,27\% > 12\%$).

(2) Persampahan

Untuk kedepan rencana penanganan sampah kota akan dialihkan dari pola 3 P menjadi 3 R yaitu dengan pola sebagai berikut:

Dari Pemukiman/Pasar → 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) → sisanya TPS → TPA

Manfaat dari pola 3R ini adalah :

1. Sampah dapat menambah nilai ekonomi masyarakat

2. Penumpukan sampah di TPS sedikit
3. Umur TPA bertambah]



Program kerja ke depan :

1. Mengadakan sarana angkutan tambahan penanggulangan sampah berupa mobil pick up untuk tiap Kecamatan dan kendaraan bermotor Tossa untuk tiap Kelurahan dan pusat kota Banjarmasin
2. Membuat TPS yang sesuai dilingkungan Kelurahan dan Transfer Station ditiap Kecamatan
3. Sosialisasi PERDA No 4 Thn 2000 serta penerapan sanksi melalui operasi Yustisi
4. Mengadakan sarana alat berat dan angkutan truk melalui bantuan APBD Kota Banjarmasin APBD Pemerintah Propinsi Kal-Sel dan Pemerintah Pusat/Departement Pekerjaan Umum
5. Mengadakan kerja sama dengan Investor atau Badan Usaha Swasta tentang pengelolaan sampah di TPA
6. Meningkatkan SDM Aparat pengelola Kebersihan melalui Pendidikan/Kursus-kursus.

Program jangka panjang :

1. Meningkatkan pola pelayanan sistem kawasan (3R) menjadi pelayanan rumah ke rumah
2. Menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan/ operasional penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah kepada pihak swasta

Program jangka pendek :

1. Melaksanakan tugas rutin sehari-hari dalam penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah
2. Mengembangkan pelayanan kebersihan ke lokasi-lokasi yang sementara ini belum terlayani
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur & petugas kebersihan)
5. Meningkatkan sosialisasi tentang sistem pengelolaan sampah dan peraturan daerah tata kebersihan
6. Melaksanakan pengelolaan dan pemusnahan sampah di TPA, dengan sistem pengomposan dan controlled landfill
7. Menjalin kerjasama operasional dengan pihak ketiga dalam penanganan dan pengelolaan sampah (swastanisasi)

Program jangka menengah :

1. Secara bertahap melaksanakan perubahan system penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah, dari pola lama 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan) ke pola baru 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)
2. Secara bertahap operasional penanganan kebersihan & pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak ketiga (dlm rangka swastanisasi)

Kegiatan yang sedang dilakukan :

1. Sosialisasi ke RT/Kelurahan/Kecamatan bekerja sama dengan Dinas terkait, majelis taklim, pengajian dan yasinan
2. Brosur, stiker, media cetak dan elektronik, radio, TVRI, tentang “Bagaimana mengolah dan membuang sampah yang benar”
3. Survey telah dilakukan di daerah pasar dan terminal, pengaruh kampanye yang telah dilakukan terhadap masyarakat dapat dilihat , yaitu masyarakat mulai sadar dan tertib membuang sampah dengan bukti telah dilakukan Yustisi pada bulan Agustus dan hanya 2 orang yang tertangkap membuang sampah pada siang hari di lokasi wilayah operasi Yustisi.
4. Penentuan Metode Kampanye untuk:
 - a. Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2000 (penyuluh, penyebaran stiker dan selebaran).
 - b. Yustisi Perda No. 4 Tahun 2000 tentang larangan membuang sampah pada siang hari

Studi-studi yang berkaitan dengan penanganan sampah :

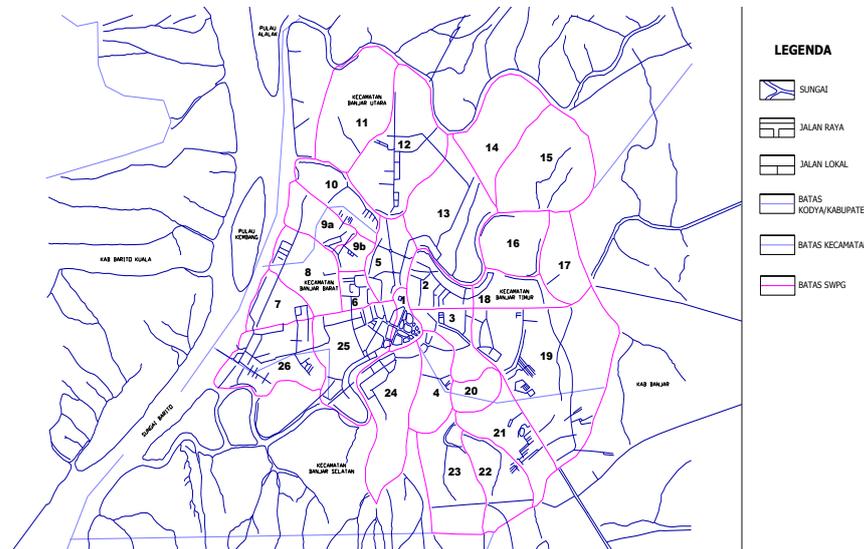
- a. Study tentang Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan dilakukan oleh Project Management Advisory Services KUDP, Advisory Air Limbah dan Persampahan PT. Indah Karya (Persero) bekerja sama dengan Montgomery Watson dan PT. Kartika Pradiptaprisma tahun 2001
- b. Study tentang pemanfaatan Gas Landfill oleh IER (International Eco Rescue) dari Swiss tahun 2006

(3) Drainase

Pengembangan dan Penataan Drainase

- **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** dimana kegiatan ini diarahkan dalam upaya pembangunan saluran drainase sesuai dengan perkembangan kota terutama sekali perkembangan perumahan dan permukiman yang cukup pesat disamping perkembangan sarana-prasarana

jasa dan perdagangan. Lokasi tersebar di Kota Banjarmasin terutama kawasan-kawasan yang cepat berkembang. Program ini diharapkan dapat mengendalikan genangan yang akan terjadi dengan sistem pembagian blok/area di tiap Satuan Penangana Wilayah Genangan dan Kode Saluran dimana di kota Banjarmasin ada **26 Satuan Wilayah Pengendali Genangan**



Gambar 10.1. Peta pelayanan drainase pembagian SWPG di Kota Banjarmasin

Program ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan pembangunan Drainase tidak seimbang dengan jumlah jalan yang ada dikota. sehingga pembangunan drainase kota ini dikembangkan di lima Kecamatan dengan jumlah dana yang diperlukan **Rp 45.500.000.000,00 (Empat puluh lima milyar lima ratus juta rupiah)** dilaksanakan bertahap.

- **Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase kota** diarahkan pada rehabiltasi sarana dan prasarana drainase yaitu berupa rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan air (drainase) dan Normalisasi Sungai yang sampai pada saat ini masih bergantung kepada pemerintah kota. Sistem jaringan drinase perlu memperhatikan kemiringan areal/daerahnya, sehingga limpasan limpasan mengalir dengan sistem gravitasi dapat mengalir dengan baik sampai kesaluran primer (Sungai). Dana yang diperlukan setiap satu tahun anggaran yaitu Rp 5 M dengan perincian : Rp 2,5 M untuk pemeliharaan bangunan & Rp 2,5 M untuk

Normalisasi Sungai. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah **Rp 20 M (Duapuluh milyar rupiah)**



Normalisasi Sungai Di JL A. Yani Normalisasi Sungai Di JL Sutoyo S

- **Program Pengendalian Banjir** diarahkan pada kawasan pusat kota yang rawan akan bahaya Banjir. Pengendalian Banjir berkaitan dengan sistem teknik drainase yang cocok dan sesuai dengan karakteristik alam yaitu kawasan sungai dengan tanah rawa. Penanganan secara teknis yaitu dengan menggunakan **sistem gravitasi, sistem polder dan sistem pompa**. Dimana ketiga sistem ini dipadukan sesuai dengan karakteristik wilayah yang akan dikembangkan, sehingga diperlukan adanya **Banjarmasin Drainage Master Plan 2026 (BDMP)** sebagai Master Plan Drainase Kota. Pada saat ini untuk kawasan rawan banjir dibuat suatu sistem Pompanisasi yang akan berlanjut dan sesuai dengan Master Plan yang akan dibuat.

Dana yang diperlukan untuk pembuatan BDMP dan pembangunan sistem pompanisasi di kota Banjarmasin adalah **Rp 36 M (Tigapuluh enam milyar rupiah)**

- **Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai** diarahkan pada konservasi dan penataan Bantaran Sungai dimana Kota Banjarmasin terkenal sebagai Kota Seribu Sungai, Penataan Bantaran Sungai dalam rangka mewujudkan sebagai Water Front City yang merupakan penataan lingkungan dan kawasan permukiman ditepi sungai sesuai dengan fungsi utama dan karakteristik kawasan. Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai pada saat ini diprioritaskan di kawasan pusat-pusat kota terutama dibantaran Sungai Martapura. Program ini membutuhkan dana sekitar Rp 5 M per tahunnya sehingga total anggaran yang diperlukan **Rp 20 M (Duapuluh milyar rupiah)**



Penataan Bantaran Sungai Depan Balai Kota

(4) Air Limbah

Tabel 10.2. Kegiatan yang sudah dilakukan :

Tahun	Kegiatan
1998 -1999	<ul style="list-style-type: none"> • Study pembangunan Pilot Project IPAL Kota Banjarmasin(Kawasan Lambung Mangkurat dan Sekitarnya + 16,5 Ha, sekarang 40 Ha tahun 2005 • Pembentukan kelembagaan /Pengelola (UPT-PAL PDAM Bandarmasih)SK. Walikota No. 173 Tahun 1998
1999 -2000	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL kawasan Lambung Mangkurat kapasitas 500 m3/hari + 200 SR • SK Walikota No 0151 Tahun 2000, tentang UPT-PAL dalam Manajemen SOTK PDAM.
2001	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan 200 SR • Terbit Perda Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Retribusi Air Limbah
2002	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan 100 SR • Pengadaan alat penunjang pemeliharaan jaringan IPAL • Evaluasi Kinerja dan rencana pengembangan
2003	<ul style="list-style-type: none"> • Out Line Plan dan Studi Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat Kawasan Pekapuran Raya dan Sekitarnya
2004	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan IPAL Tahap I Kawasan Pekapuran Raya 500 m3/hari dari Program 4000 m3/hari
2005	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Pengembangan Jaringan Kawasan Pekapuran Raya 36 SR • Studi kelayakan rencana pembentukan PD PAL Kota Banjarmasin
2006	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan PD PAL • Penyertaan Modal Pemko Rp 4,3 Milyar

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL Kawasan Kayu Tangi 100 m³/hari Program 5000 m³/hari
--	--

Studi-studi yang berkaitan dengan air limbah :

Tabel 10.3. Studi tentang PD PAL

NO	STUDY	PENGARANG	Sumber Dana	TAHUN
1	Perencanaan Pilot Project Pengolahan Air Limbah	PT. Mitra Lingkungan Dutaconsult	Pusat	1998
2	IPLTL	PT. Mitra Lingkungan Dutaconsult	Pusat	1998
3	Evaluasi Kinerja Dan Rencana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat Di Banjarmasin Dan Balikpapan	PT. Zimisi Tribina Marubama	Pemko	2002
4	Out Plant Pekapuran Raya	PT. Reka Utama Agung	Pemko	2003
5	DED Pekapuran Raya	PT. ASRI	Pemko	2003
6	Inventarisasi Pelanggan IPAL	CV. Winako Graha	Pemko	2004
7	Kelayakan Rencana Pembentukan PD PAL	CV. Fajar Karya Pratama	Pemko	2005

Program Pengembangan :

Tabel 10.4. Tahapan Pengembangan Cakupan Pelayanan Air Limbah di Tiga Titik Kawasan

INDIKATOR	LOKASI	EXISTING S/D 2005	TAHUN					TOTAL
			2006	2007	2008	2009	2010	
Kapasitas Pengolahan (STP)	1. Lambung Mangkurat	500 M ³ /hari	-	-	-	-	-	500 M ³ /hari
	2. Pekapuran Raya	500 M ³ /hari	-	1.500 M ³ /hari	2.500 M ³ /hari	-	-	4.500 M ³ /hari
	3. HKSN/Kayu Tangi	-	100 M ³ /hari	-	2.000 M ³ /hari	3.000 M ³ /hari	-	5.100 M ³ /hari
Jumlah Pelanggan	1. Lambung Mangkurat	528 SR	-	-	-	200 SR	-	728 SR
	2. Pekapuran Raya	36 SR	-	500 SR	4.000 SR	-	4.000 SR	8.536 SR
	3. HKSN/Kayu Tangi	-	-	100 SR	-	8000 SR	8.000 SR	16.100 SR
Jumlah Penduduk Yang Terlayani	1. Lambung Mangkurat	2.640 Pe	-	-	-	1.000 Pe	-	3.640 Pe
	2. Pekapuran Raya	180 Pe	-	2.500 Pe	20.000 Pe	-	20.000 Pe	42.680 Pe
	3. HKSN/Kayu Tangi	-	-	500 Pe	-	40.000 Pe	40.000 pe	80.500 Pe
Cakupan Pelayanan Terhadap Jumlah Penduduk	1. Lambung Mangkurat	0.44 %	-	-	-	0.17 %	-	0.61 %
	1. Pekapuran Raya	0.03 %	-	0.42 %	3.32 %	-	3.32 %	7.09 %
	3. HKSN/Kayu Tangi	-	-	0.08 %	-	6.64 %	6.64 %	13.36 %

Strategi pengembangan daerah layanan :

Apabila 14 titik pelayanan sudah terealisasi maka 75% penduduk kota Banjarmasin akan terlayani. Untuk mewujudkan program tersebut memerlukan waktu minimal 20 tahun dan dana yang tidak sedikit. Sedangkan saat ini keadaan sanitasi masyarakat sudah memerlukan pelayanan yang mendesak. Jadi guna mempercepat pelayanan PDPAL akan melakukan strategi sebagai berikut :

Untuk sistem perpipaan skala besar (sistem skala kota - Off site):

1. Prioritas pelayanan I adalah daerah pusat bisnis, yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional. Sebab diharapkan di kawasan ini kemampuan membayar masyarakat lebih tinggi
2. Prioritas pelayanan II adalah daerah pengembangan pemukiman baru (Kasiba & Lisiba), tujuannya guna mendukung program pengembangan lingkungan pemukiman yang memenuhi fasilitas dasar
3. Prioritas pelayanan III adalah daerah permukiman menengah - atas & industri kecil - menengah
4. Prioritas pelayanan IV adalah daerah baru untuk perkantoran & permukiman masa depan.

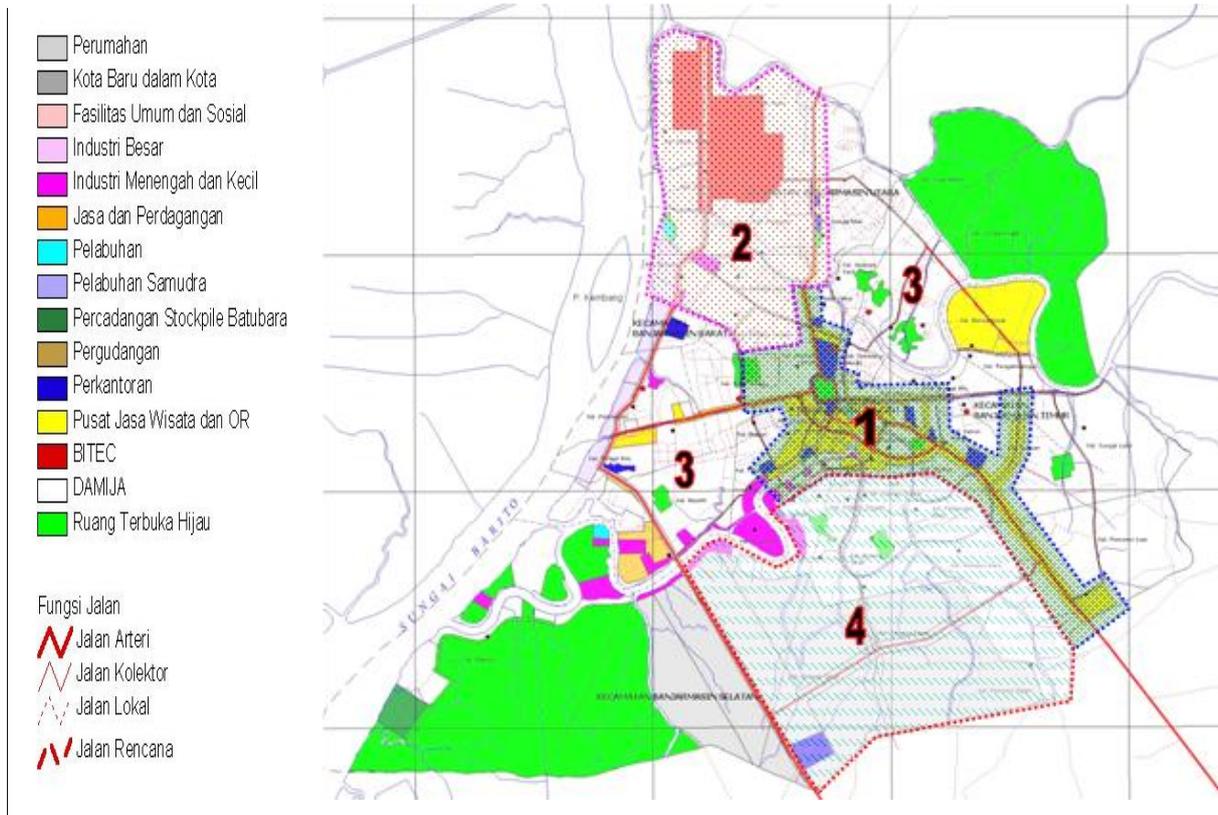
Untuk sistem perpipaan skala kecil (On - site) :

1. Prioritas pelayanan I adalah daerah - daerah yang tidak dapat dilayani sistem terpusat skala kota dan di daerah miskin dipusat kota
2. Prioritas pelayanan II adalah daerah - daerah diluar prioritas I tetapi diluar pusat kota.

Untuk sistem perpipaan skala kecil, programnya akan melibatkan masyarakat secara penuh. Lebih lanjut bila sistem tersebut tidak memungkinkan menghasilkan limbah yang memenuhi syarat efluen, maka akan dilayani dengan truk tinja.

Dengan strategi ini diharapkan waktu yang diperlukan akan berkurang, paling tidak pada tahun 2015 target MDG akan tercapai. Lebih lanjut diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisa ketepatan pembagian wilayah pelayanan, skala prioritas dan pentahapan.

Gambar 10.2. Peta Rencana strategis pengembangan daerah pelayanan IPAL Kota Banjarmasin



KONSOLIDASI PROGRAM SANITASI SKALA KOTA

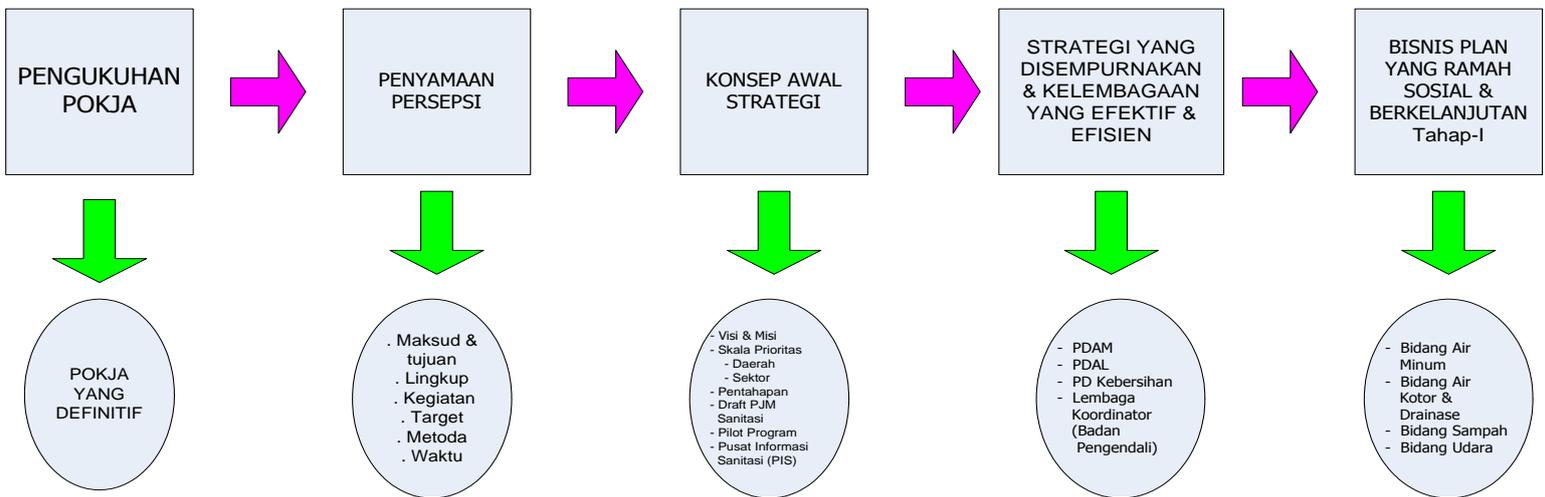
11. Konsolidasi Program Sanitasi Skala Kota

NO	DINAS	SEKTOR	PROGRAM
1	PDAM	Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pengembangan Sistem 2. Penyesuaian Tarif 3. Profesionalisme karyawan
2	DKPS	Persampahan	<p>Untuk kedepan rencana penanganan sampah kota akan dialihkan dari pola 3 P menjadi 3 R yaitu dengan pola sebagai berikut: Dari Pemukiman/Pasar → 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) → sisanya TPS → TPA</p> <p>Program Kerja Kedepan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sarana angkutan tambahan penanggulangan sampah berupa mobil pick up untuk tiap Kecamatan dan kendaraan bermotor Tossa untuk tiap Kelurahan dan pusat kota Banjarmasin 2. Membuat TPS yang sesuai dilingkungan Kelurahan dan Transfer Depo ditiap Kecamatan 3. Sosialisasi PERDA No 4 Thn 2000 serta penerapan sanksi melalui operasi Yustisi 4. Mengadakan sarana alat berat dan angkutan truk melalui bantuan APBD Kota Banjarmasin APBD Pemerintah Propinsi Kal-Sel dan Pemerintah Pusat/Departement Pekerjaan Umum 5. Mengadakan kerja sama dengan Investor atau Badan Usaha Swasta tentang pengelolaan sampah

			<p>di TPA</p> <p>6. Meningkatkan SDM Aparat pengelola Kebersihan melalui Pendidikan/Kursus-kursus</p>
3	KIMPRASKO	Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2. Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase 3. Program Pengendalian Banjir 4. Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai
4	PD PAL	Air Limbah	<p>Pekapuran Raya, Tahun 2006 s/d 2009 : pengembangan sistem dari kapasitas 500 m³/hari menjadi 4500 m³/hari</p> <p>Kayu Tangi, Tahun 2006 s/d 2007 penyelesaian Sistem 100 m³/hari</p> <p>Lambung Mangkurat, Tahun 2007 : Penambahan 200 SR</p> <p>Banjarmasin, Tahun 2015 dst : Menyelesaikan rencana 11 (sebelas) titik kawasan. Untuk rencana ini masih perlu kajian lebih lanjut.</p>

KONSEP RENCANA KEGIATAN POKJA

TAHAPAN RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI KOTA BANJARMASIN



2006/07

PJM TAHAP I 2008-2010



Bab - 13

PENUTUP

13. Penutup

Penyusunan Buku Putih sebagai awal penyiapan Rencana Strategis Tiga - Lima tahunan (periode 2008 - 2010/2012) , diharapkan dapat memberi inspirasi baru bagi pembangunan dibidang sanitasi secara lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Tahap kegiatan selanjutnya diharapkan akan dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirul kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan pelbagai pihak atas terwujudnya Laporan ini.